

**SANKSI HUKUM DALAM PERKAWINAN SUKU MELAYU JERIENG DI
KECAMATAN SIMPANG TERITIP BANGKA
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Dan Melengkapi Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam
(S.H. I)



OLEH

BAHRIDI
10521001042

**PROGRAM S1
JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2010**

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul : "SANKSI HUKUM DALAM PERKAWINAN SUKU MELAYU JERIENG DI KECAMATAN SIMPANG TERITIP BANGKA MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM".

Penelitian ini berlokasi di pusat wilayah pelaksanaan hukum adat suku Melayu Jerieng, yakni di kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat. Salah satu hukum adat Melayu Jerieng yang masih dilaksanakan sampai sekarang adalah adat buyong yang berarti mengawini kerabat dekat. Perkawinan semacam ini terlarang menurut hukum adat Melayu Jerieng. Bagi warga yang melanggar larangan ini maka akan dikenakan sanksi adat.

Dalam hukum perkawinan Islam juga melarang umatnya mengawini kerabat dekat, akan tetapi larangan tersebut dibatasi oleh syari'at itu sendiri berdasarkan ketetapan nash. Adapun batasan larangan dalam perkawinan buyong tidak hanya berlaku terhadap perempuan yang telah ditetapkan oleh nash saja, akan tetapi lebih luas dibandingkan dengan larangan dalam hukum Islam. Ada bagian yang tidak dilarang oleh syari'at namun dilarang dalam hukum adat buyong.

Adapun permasalahan utama dalam penelitian ini adalah sanksi hukum perkawinan adat buyong. Apa yang melatarbelakangi munculnya sanksi hukum dalam adat ini dan bagaimana bentuk sanksi dalam adat ini. Dari persoalan ini timbul permasalahan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap larangan dan sanksi hukum dalam adat buyong.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan atau field research. Dalam pengumpulan data menggunakan beberapa metode, yaitu: teknik observasi, teknik wawancara, dan studi dokumentasi.

Mengenai larangan mengawini kerabat dekat, yaitu perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang masih mempunyai hubungan darah dalam silsilah kekeluargaan, pada dasarnya larangan dalam adat buyong ada persamaan dengan hukum Islam, dan ada juga bagian yang tidak sama. Adapun larangan yang sesuai dengan hukum Islam, maka hal itu dapat menjadi hukum yang dapat dilaksanakan. Dalam pelaksanaannya hukum adat buyong sangat

berbeda dengan hukum Islam. Perbedaan tersebut terlihat dari bentuk-bentuk larangannya, dimana bagi pengantin yang masih digolongkan ke dalam kerabat maka keduanya dilarang menikah akan tetapi keduanya bare diizinkan setelah menjalankan hukuman.

Golongan perempuan yang dilarang mengawininya adalah ibu, nenek; baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu, anak, cucu; baik cucu dari anak laki-laki maupun dari anak perempuan, saudara; baik saudara kandung, seapak dan seibu saja, saudara ayah, saudara ayah, saudara ibu, saudara ayah, saudara ibu, saudara sepupu ayah dan saudara sepupu ibu, saudara sepupu; baik dari pihak ayah maupun pihak ibu, cucu dari saudara sepupu ayah dan cucu dari saudara sepupu ibu, anak perempuan sepupu laki-laki.

Apabila terjadi perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan di atas, maka pelakunya akan dikenakan sanksi berupa denda dan hukuman badan dari para pemangku adat.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa sanksi hukum dalam perkawinan adat buyong termasuk ke dalam adat fasid. Menurut hukum Islam apabila adat tersebut fasid maka tidak dapat dijadikan sebagai sumber hukum, dan tidak sah untuk diamalkan karena is bertentangan dengan hukum Islam. Ditinjau dari hukum Islam jelas adat tersebut bertentangan dengan Hukum Islam.

DAFTAR ISI	
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	ix
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Kegunaan Penelitian	7
F. Metode Penelitian	7
G. Sistematika Penulisan	11
BAB II : IDENTIFIKASI OBJEK PENELITIAN DAN SUBJEK PENELITIAN DI KECAMATAN SIMPANG TERITIP	
A. Keadaan Umum	13
B. Asal Usul Suku Melayu Jerieng	20
C. Keberadaaan Hukum Adat Melayu Jerieng	22
D. Tujuan Hukum Adat Melayu Jerieng	23
E. Sumber Hukum Adat Melayu Jerieng	24
F. Asal-Usul Aturan Adat Dalam Suku Melayu Jerieng	25
BAB II : TINJAUAN PERKAWINAN SUKU MELAYU JERIENG DAN PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM	
A. Tinjauan Perkawinan Suku Melayu Jerieng	27
B. Perkawinan Menurut Hukum Islam	31

BAB IV : SANKSI HUKUM DALAM PERKAWINAN ADAT

BUYONG PADA SUKU MELAYU JEIRENG

A. Latar Belakang Munculnya Sanksi Hukum

Dalam Adat Buyong 50

B. Bentuk-Bentuk Sanksi Hukum Dalam Adat Buyong 54

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hukum Adat Buyong Pada

Suku Melayu Jerieng 59

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan 75

B. Saran 76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Melayu Jerieng merupakan nama salah satu suku yang ada di Pulau Bangka bagian barat, tepatnya di kecamatan simpang Teritip kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Melayu Jerieng mempunyai baths wilayah antara lain: sebelah utara dengan laut Natuna dan kecamatan Jebus, sebelah selatan dengan Selat Bangka, sebelah timur dengan kecamatan Kelapa, dan sebelah barat dengan kecamatan Muntok,¹ penduduknya sebagian besar menganut agama Islam, sedangkan mata pencaharian penduduk sebagian besar adalah sebagai petani.

Masyarakat suku Melayu Jerieng masih mempertahankan adatnya. Implementasi hukum adat seperti, hukum buang, badan, dan denda, sebagai sanksi atas perbuatan maleng,² betian di uten,³ bekelai, munoh,⁴ dan buyong hingga saat ini

¹ Bagian Pemerintahan, *Laporan Kependudukan Kecamatan bulan Mei 2009*, (Pelangas: Pemerintahan Kecamatan Simpang Teritip, 2009), tanpa halaman

² Maleng adalah mengambil sumber mata pencaharian warga adat tanpa seizin pemiliknya, seperti mengambil daun nipah yang sedang disadap (yang sudah dikapling) dan menebang di kayu wilayah adat (utan puji / tanah adat) tanpa seizin ketua adat.

³ Betian di uten atau dalam istilah lainnya ngambin lanjong adalah perzinahan atau hubungan suami istri tanpa akad nikah sesuai syarak yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan, sehingga perempuan hamil.

⁴ Munoh adalah pembunuhan atau menghilangkan nyawa seseorang yang dilakukan karena

masih dipatuhi warga suku Melayu Jerieng

Dan beberapa bentuk hukum adat suku Jering tersebut adat buyong masih tetap dijalankan sampai sekarang. Buyong merupakan istilah masyarakat suku Jerieng yang berarti kawin dengan kerabat dekat.⁵ Menurut masyarakat adat Melayu Jerieng, perkawinan ini merupakan perkawinan terlarang, sehingga bagi warga Melayu Jerieng yang tetap melaksanakannya akan dikenakan sanksi. Sanksi tersebut yaitu membayar sejumlah denda dan hukuman badan.⁶ Ada beberapa kasus yang peneliti temukan adanya warga yang mendapat sanksi hukum karena telah melakukan perkawinan buyong, sebagaimana terlihat dari beberapa kasus berikut ini:

Kasus *pertama*, dialami oleh pasangan Firdaus (36 tahun) dan Lisnawati (27 tahun), dimana keduanya telah melaksanakan perkawinan pada tahun 2000 yang lalu. Pasangan ini menerima sanksi adat karena telah melakukan perkawinan buyong nuron.⁷ Buyong Nuron adalah seorang laki-laki mengawini sepupu dari pihak ibu dan terus ke bawah. Misalnya, fulan mengawini saudara sepupu perempuan dari pihak ibu, atau mengawini anak perempuan saudara sepupu dari pihak ibu, atau cucu perempuan saudara sepupu dari pihak ibu.

Terdapat dua sanksi terhadap pelanggaran adat ini yaitu sanksi berupa denda dan hukuman badan. Dalam hal sanksi denda bagi warga yang telah melanggar

akibat perkelahian atau kelalaian yang mengakibatkan seseorang meninggal dunia

⁵ Sardi al-Palangasi, *Khazanah Bangka Barat Istiadat, Hukum Adat, dan Gelar Sapaan Adat Suku Jerieng*, (Bangka: Lembaga Adat Melayu Jereng, 2007), h. 4

⁶ *Ibid*, h. 45

⁷ Firdaus (warga Suku Melayu Jerieng), *Wawancara*, Jum'at 30 Oktober 2009

aturan ini akan mendapat sanksi berupa membayar uang sebanyak 6 wang⁸, 6 cupak beras, 6 kati gula (1 kati = 6 ons). Adapun hukuman badan yang harus dijalani paktel⁹ adalah berupa digoresi daun telinga dengan menggunakan daun tebu hitam hingga mengeluarkan darah dan disirami dengan air panas. Hukuman badan ini dilaksanakan ketika upacara adat berlangsung.¹⁰

Kasus *kedua*, dialami oleh pasangan Sumi'an (32 tahun) dan Jumiyah (28 tahun) yang telah melaksanakan perkawinan pada tahun 1999,¹¹ dimana keduanya juga menerima sanksi adat karena telah melakukan perkawinan buyong nayek. Buyong Nayek adalah seorang laki-laki mengawini sepupu bapak atau sepupu ibu terus ke atas. Misalnya, fulan mengawini seorang perempuan dimana perempuan tersebut adalah saudara sepupu bapak atau sepupu ibunya, atau fulan mengawini seorang perempuan dimana perempuan tersebut adalah ibu dari saudara sepupu bapak atau sepupu ibunya.

Sanksi denda bagi pelaku buyong nayek atau buyong 24 dibebankan membayar denda serba 24 seperti, uang sebanyak 24 tali, beras sebanyak 24 gantang, tikar Kuang¹² sebanyak 24 lembar, dan tali yang digunakan untuk ayunan yang terbuat dari

⁸ Wang merupakan mata uang yang berlaku pada zaman dulu. Nilai Rp. 1 sama dengan 10 Wang, 1 wang sama dengan 10 sen, Rp. 2,5 sama dengan 1 ringgit

⁹ Paktel adalah istilah atau nama panggilan untuk pars terhukum pada pelaksanaan hukum adat Suku Jerieng. Para Paktel ini selama menjalani hukuman tidak diperkenankan menggunakan baju alias bertelanjang dada, kecuali Paktel yang berjenis kelamin perempuan

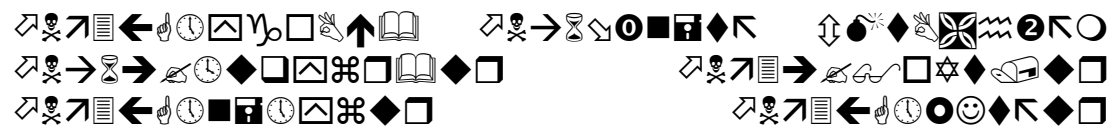
¹⁰ Sardi al -Palangasi, *op.cit*, h. 43

¹¹ Jumiyah (warga suku Melayu Jerieng), *Wawancara*, Jum'at 30 Oktober 2009

kulit kayu sebanyak 24 ginta¹³. Adapun hukuman badan bagi pelaku buyong nayek adalah digoresi kedua daun telinga dengan menggunakan dawn lais dan daun tebu hitam hingga mengeluarkan darah. Kemudian para paktel diwajibkan menginjak-injak bara api dan disirami dengan air panas.¹⁴

Bertolak dari uraian di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian guna mendalami hukum adat suku Melayu Jerieng khususnya adat buyong. Mengapa perkawinan buyong dilarang dan mengapa bagi pelakunya akan dikenakan sanksi, serta apa yang melatarbelakangi adanya larangan dan sanksi tersebut. Sebab dalam Islam, hukum perkawinan telah diatur oleh syari'at, termasuk di dalamnya adalah ketentuan orang-orang yang boleh atau tidak boleh melakukan perkawinan. Perempuan mana saja yang tidak boleh dikawini oleh seorang laki-laki; atau sebaliknya laki-laki mana saja yang tidak boleh mengawini perempuan.

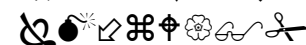
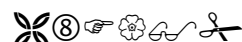
Dalam hal adanya hubungan kekerabatan, hukum Islam membatasi larangan perkawinan terbatas kepada perempuan yang telah disebutkan oleh nash syari' berdasarkan keterangan di dalam Al Quran surah An Nisa ayat 23 yang berbunyi sebagai berikut:



¹² Jumiyah (warga suku Melayu Jerieng), *Wawancara*, Jum'at 30 Oktober 2009

¹³ 1 tali sama dengan 25 sen, 1 gantang (gantang besak) sama dengan 1 kg, 1 cupak sama dengan 250 gram, 1 kati sama dengan 6 ons

¹⁴ Sardi al -Palangasi, *Loc.cit*



Artinya : *"Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, Saudarasiswa bapakmu yang perempuan; Saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan..."*¹⁵

Menurut penjelasan ayat di atas, jelas seorang muslim tidak diperkenankan mengawini ibunya termasuk nenek, baik nenek dari pihak ayah maupun pihak ibu, anak perempuan termasuk cucu, baik cucu dari anak laki-laki maupun dari anak perempuan, saudara perempuan baik sekandung, seayah, atau seibu saja, bibi (saudara bapak atau saudara ibu), kemenakan perempuan baik dari saudara laki-laki maupun saudara perempuan.¹⁶

Dari latar belakang permasalahan ini, maka penulis melakukan penelitian yang akan dituangkan ke dalam bentuk karya ilmiah atau skripsi dengan judul "SANKSI HUKUM DALAM PERKAWINAN SUKU MELAYU JERIENGDI KECAMATAN SIMPANG TERITIP BANGKA MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM".

¹⁵ Departemen Agama, *Al Quran Terjemahan dan Penjelasan Ayat Hukum*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2002), h. 64

¹⁶ Abd. Rahman Gha7aly, *Fiqh Mumakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), Cet. Ke-2, h. 105

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dalam penelitian ini permasalahan perlu dibatasi. Adapun batasan masalah tersebut adalah peneliti membatasi permasalahan pada adat buyong dalam perkawinan adat suku Melayu Jerieng di Kecamatan Simpang Teritip.

C. Rumusan Masalah

Agar permasalahan lebih fokus maka penulis akan merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Apa yang melatarbelakangi munculnya sanksi hukum dalam perkawinan adat buyong?
2. Bagaimana bentuk sanksi hukum adat buyong?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap hukum adat buyong?

D. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui latar belakang munculnya sanksi hukum perkawinan dalam adat buyong
2. Untuk mengetahui bentuk sanksi hukum adat buyong
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap hukum adat buyong

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan berguna untuk:

1. Untuk menambah pengetahuan wawasan penulis dalam melihat permasalahan-permasalahan adat suku Melayu Jerieng.
2. Untuk membantu memberikan informasi kepada masyarakat Bangka khususnya dan masyarakat luar secara umum tentang hukum adat suku Melayu Jerieng.

3. Untuk menemukan masalah-masalah baru tentang hukum adat yang belum ditemukan di lapangan ilmu pengetahuan
4. Sebagai persyaratan yang harus penulis laksanakan guna untuk mendapatkan gelar sarjana hukum islam di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

F. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Menurut jenisnya, penelitian ini adalah penelitian lapangan. Penulis akan mengadakan penelitian secara langsung di pusat wilayah pelaksanaan hukum adat suku Melayu Jerieng, yakni di kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah tokoh adat yang mempunyai peran dalam kepengurusan lembaga adat suku Melayu Jerieng di Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat berjumlah 4 orang, sedangkan yang menjadi objeknya adalah sanksi hukum dalam adat buyong pada suku Melayu Jerieng menurut perspektif hukum Islam.

3. Populasi dan Sampel

Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah semua tokoh adat suku Melayu Jerieng sebanyak 4 orang namun karena jumlah populasi yang terbatas maka penulis dalam melakukan penelitian ini tidak menggunakan sampel. Penulis mengambil dua kasus yang pernah diputuskan, dimana kedua kasus tersebut masing-masing terjadi pada tahun yang berbeda. Kasus pertama, dialami oleh pasangan Firdaus (36 tahun) dan Lisnawati (27 tahun), dimana keduanya telah melaksanakan perkawinan pada tahun 2000, sedangkan kasus

kedua Kasus kedua, dialami oleh pasangan Sumi'an (32 tahun) dan Jumiya (28 tahun) yang telah melaksanakan perkawinan pada tahun 1999.

4. Sumber Data

Sebagaimana penelitian ilmiah lainnya, penelitian ini pun menggunakan dua sumber data, yaitu:

a. Data Primer

Sumber data primer, ialah sumber data yang diperoleh melalui hasil wawancara terhadap tokoh adat Melayu Jerieng sebanyak 4 orang, termasuk di dalamnya adalah wawancara terhadap ketua Lembaga Adat Melayu Jerieng Bangka Barat, ketua harian Lembaga Adat Negeri Serumpun Sebalai Propinsi Kepulauan Bangka Belitung.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah buku-buku dan hasil laporan penelitian (karya tulis) serta artikel penunjang seperti kutipan langsung maupun tidak langsung mengenai hukum adat Melayu Jerieng dan sumber dari warga yang melakukan perkawinan buyong. Selain sumber-sumber tersebut, data penunjang juga dikumpulkan dan tokoh masyarakat lainnya yang diperlukan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan, maka penulis menggunakan beberapa metode antara lain:

- a. Observasi, yaitu peneliti melakukan pengamatan terhadap kehidupan masyarakat Suku Melayu Jerieng. Teknik observasi yang digunakan dalam penelitian ini disebut observasi partisipan dimana peneliti menjadi peserta dalam kegiatan-kegiatan kelompok yang akan diteliti. Untuk mengobservasi kehidupan masyarakat Suku Jerieng, penulis ikut berpartisipasi atau terlibat

langsung dalam aktifitas sehari-hari masyarakat Melayu Jerieng.

- b. Wawancara, yaitu suatu metode pengumpulan data melalui proses tanya jawab yang penulis lakukan terhadap tokoh adat suku Melayu Jerieng. Adapun dalam pengumpulan data ini penulis akan bertanya tentang latar belakang adanya sanksi hukum dalam adat buyong dan bentuk sanksi hukum adat buyong.
- c. Dokumentasi, yaitu penelifi mengumpulkan data-data tentang hukum adat Melayu Jerieng dalam bentuk dokumen, hasil laporan penelitian, dan buku-buku.

6. Teknik Analisa Data

Analisa data pada penelitian ini menggunakan pendekatan analisis isi (content analysis), penulis akan menganalisa dengan data-data kualitatif. Semua data yang terkumpul, baik primer dan sekunder yang berbentuk buku, karva tulis, artikel, wawancara dianalisis sehingga berhasil menjawab dan menyimpulkan persoalan dalam penelitian ini.

Tahapan selanjutnya adalah mendeskripsikan temuan-temuan yang didapat, kemudian menelaah keterkaitan data-data tersebut. Kemudian data-data tersebut diuraikan antara data satu dengan data yang lainnya, selanjutnya data-data tersebut dihubungkan sehingga diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah yang diteliti.

7. Metode Penulisan

- a. Metode deduktif, adalah mengumpulkan, menelaah dan meneliti data yang bersifat umum kemudian diambil kesimpulan yang bersifat khusus.
- b. Metode induktif, adalah mengumpulkan data, menelaah dan meneliti data yang bersifat khusus kemudian diambil pengertiannya secara umum.

- c. Metode deskriptif, adalah mengumpulkan data apa adanya kemudian diambil dan dianalisa sebagaimana mestinya,

G. Sistematika Penulisan

Guna mensistematiskan pembahasan, maka penulisan skripsi ini perlu disistematiskan. Berikut ini adalah sistematika penulisan antara lain:

Bab I : Pendahuluan, pada bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metodologi penelitian, sistematika penulisan.

Bab II : Identifikasi subjek dan objek penelitian di kecamatan Simpang Teritip, pada bab ini memuat tentang keadaan umum, asal usul suku Melayu Jerieng, keberadaan hukum adat Melayu Jerieng, tujuan hukum adat Melayu Jerieng, sumber hukum adat Melayu Jerieng, asal-usul aturan adat dalam suku Melayu Jerieng.

Bab III : Tinjauan perkawinan suku Melayu Jerieng dan perkawinan menurut hukum Islam, pada bab ini penulis akan menjelaskan tinjauan perkawinan suku Melayu Jerieng yang meliputi; sejarah perkawinan suku Melayu Jerieng, bentuk-bentuk perkawinan pada suku Melayu Jerieng, perkawinan menurut hukum Islam yang meliputi; pengertian perkawinan, prinsipprinsip perkawinan, larangan perkawinan, tujuan perkawinan.

Bab IV : Sanksi hukum dalam perkawinan adat buyong pada suku Melayu Jerieng, pada bab ini penulis akan menerangkan latar belakang munculnya sanksi hukum dalam adat buyong, bentuk-bentuk

sanksi hukum dalam adat buyong, tinjauan hukum Islam terhadap hukum adat buyong pada suku Melayu Jerieng.

Bab V : Kesimpulan dan Saran, pada bab ini berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

IDENTIFIKASI OBJEK DAN SUBJEK PENELITIAN

DI KECAMATAN SIMPANG TERITIP

A. Keadaan Umum.

1. Letak Geografis.

Kecamatan Simpang Teritip terletak di bagian tengah Kabupaten Bangka Barat. Daerah ini terdiri dari perbukitan, rawa-rawa, daratan datar, hutan lebat dan pesisir, mempunyai luas wilayah *626,47 km² dengan rincian: tanah perkebunan rakyat 2623 ha, tanah perkebunan swasta 3022,66 ha, tanah kas desa 40 ha, perkantoran pemerintah 10,50 ha, hutan lindung 406 ha, dan hutan sisanya lahan kosong. Dengan jumlah penduduk 23.715 jiwa.¹

Kecamatan Simpang Teritip berbatasan dengan: sebelah utara dengan Laut Nahum dan Kecamatan Jebus, sebelah selatan dengan Selat Bangka, sebelah timur dengan Kecamatan Kelapa, dan sebelah Barat dengan Kecamatan Muntok. Secara geografis terletak pada koordinat 105°12' 12"105° 28' 30" BT dan 01° 50' 00"- 01° 51' 15" LS.

¹ Bagian Pemerintahan, *Laporan Kependudukan Kecamatan bulan April 2010*, (Pelangas: Pemerintahan Kecamatan Simpang teritip, 2010).

2.Demografis.
a. Penduduk.

Secara administratif pemerintahan kecamatan Simpang Teritip terdiri dari 13 desa, sedangkan jumlah penduduknya jika diklasifikasikan menurut jumlah penduduk pada tiap desa maka akan terlihat pada tabel di bawah ini:

TABEL I
Daftar Nama Desa Kecamatan Simpang Teritip Dan Jumlah penduduk Di Setiap Desa

P			
No	Nama Desa	Jumlah Penduduk	Persentase
1	Pelangas	1.622	7,00 %
2	Kundi	2.181	9,41 %
3	Mayang	2.069	8,93 %
4	Peradong	1.576	6,80 %
5	Air Nyatoh	2.365	10,21 %
6	Berang	2.591	11,18 %
7	Rambat	945	4,08 %
8	Simpang Gong	1.160	5,01 %
9	Simpang Tiga	1.696	7,32 %
10	Ibul	2.279	9,83 %
11	Pangek	2.057	8,88 %
12	Air Menduyung	1.349	5,82 %
13	Bukit Terak	1.282	5,53 %
Jumlah		23.172	, 100 %

Sumber Data : Kantor Carnal Simpang Teritip 2010.

Berdasarkan tabel di atas, jumlah penduduk kecamatan Simpang Teritip berjumlah 23.172. Desa yang memiliki jumlah penduduk

terbesar berpenghuni di desa Berang yaitu berjumlah 2.591 orang atau 11,18 %. Sedangkan desa yang paling sedikit jumlah penduduknya berpenghuni di desa Rambat yaitu dengan jumlah penduduk 945 orang atau 4,08 %.

Adapun jumlah penduduk Kecamatan Simpang Teritip jika diklasifikasikan menurut jenis kelamin, dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

TABEL II
Klasifikasi Jumlah Penduduk Kecamatan Simpang Teritip
Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-laki	11.591	50,02 %
2	Perempuan	11.581	49,98 %
Jumlah		23.172	100 %

Sumber Data : *Kantor C'atnat Simpang Teritip 2010*

Dari label di atas, dapat diketahui bahwa jumlah penduduk yang berjenis kelamin laki-laki lebih banyak yakni berjumlah 11.591 orang atau 50,02 %. Sedangkan jumlah penduduk yang berjenis kelamin perempuan lebih sedikit yakni berjumlah 11.581 orang atau 49,98 %.

Sedangkan klasifikasi penduduk menurut usia dapat dilihat sebagaimana label berikut:

TABEL III

Klasifikasi Penduduk Menurut Usia

No.	Klasifikasi Usia	Jumlah	Persentase
1	0 — 5 tahun	5.202	18,14 %
2	6 — 16 tahun	5.613	24,22 %
3	17 — 55 tahun	12.464	53,79 %
4	56 tahun ke atas	893	3,85 %
Jumlah		23.172	100 %

Sumber Data : *Kantor Camat Simpang Teritip 2010*

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang berusia 17 hingga 55 tahun merupakan jumlah terbanyak yaitu 12.464 orang atau 53,79 %, sedangkan penduduk yang berusia 56 tahun ke atas merupakan yang paling sedikit yaitu 893 orang atau 3,85 %.

b. Mata Pencarian.

Mata pencarian merupakan aktifitas terpenting pada suatu masyarakat begitu juga pada masyarakat Melayu Jerieng. Bagian terbesar masyarakat Melayu Jerieng bermata pencarian sebagai petani, khususnya petani campuran (berume), pekerja buruh dan sebagian bidang usaha swasta.

Adapun klasifikasi penduduk Melayu Jerieng menurut jenis pekerjaan sebagaimana tabel berikut:

TABEL IV**Klasifikasi Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan**

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Persentase
1	Petani	3.419	53,20 %
2	Nelayan	695	10,81 %
3	PNS	146	2,27 %
4	Anggota Dewan	4	0,06 %
5	Buruh	1.912	29,75 %
6	Pedagang	208	3,24 %
7	Peternak	4	0,06 %
8	Montir	23	0,36 %
9	Pengrajin	13	0,25 %
Jumlah		6426	100 %

Sumber Data : *Kantor Carnal Simpang Teritip 2010*

Berdasarkan hasil tabel di atas, sebanyak 6426 orang warga sudah bekerja. Sedangkan jenis pekerjaan pada masyarakat Melayu Jerieng ada beberapa macam. Jenis pekerjaan masyarakat Melayu Jerieng yang paling banyak dilakukan adalah bekerja sebagai petani sejumlah 3.419 orang atau sebesar 53,20 %, sedangkan jenis pekerjaan yang paling sedikit dilakukan adalah menjadi anggota dewan atau politikus dan peternak masing-masing ada 4 orang atau 0,05 %.

c. Agama atau Kepercayaan.

Sebagaimana lazimnya dalam suatu masyarakat yang memegang suatu ajaran agama atau setidaknya memiliki suatu kepercayaan, begitu juga pada masyarakat Melayu Jerieng, mereka memeluk beberapa ajaran agama.

Pada dasarnya penduduk Melayu Jerieng menganut agama Islam. akan tetapi karena wilayah kecamatan Simpang Teritip pada masa sekarang ini sudah dihuni tidak hanya penduduk asli yang notabenehnya warga Melayu Jering, maka di samping agama Islam juga terdapat agama lainnya sebagaimana tabel berikut ini:

TABEL V
Klasifikasi Penduduk Berdasarkan Agama Atau Kepercayaan

No	Agama atau Kepercayaan	Jumlah	Persentase
1	Islam	22.064	95,22 %
2	Protestan	95	0,41 %
3	Katolik	23	0,10 %
4	Budha	155	0,67 %
5	Konghucu	835	3,60 %
Jumlah		23.172	100 %

Sumber Data : *Kantor Camat Simpang Teritip 2010*

Dari tabel di atas, masyarakat kecamatan Simpang Teritip menganut berbagai macam agama. Terdapat lima macam agama yang dianut, yaitu agama Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Budha, dan Konghucu.

Agama Islam merupakan agama terbesar penganutnya, karena mayoritas penduduk asli memang beragama Islam. Jumlah penduduk di wilayah kecamatan Simpang Teritip yang beragama Islam berjumlah 22.064 orang atau 95,22 %. Sedangkan agama kedua terbanyak penganutnya adalah agama Konghucu berjumlah 835 orang atau 3,60 %. Sedangkan agama yang paling sedikit penganutnya yaitu agama Katolik yang berjumlah 23 atau 0,10 %

d. Pendidikan.

Pendidikan merupakan tolak ukur sumber daya manusia yang berkualitas dalam suatu masyarakat, maka dari itu sektor pendidikan menjadi sangat penting demi kemajuan sebuah pembangunan, begitu juga untuk kemajuan suatu daerah.

Dilihat dari tingkat pendidikan, pada masyarakat kecamatan Simpang Teritip kaum terpelajar sudah memadai, meskipun masih minim warga yang berstatus berpendidikan sekolah tinggi. Hal ini dapat terlihat pada jumlah masyarakat kecamatan Simpang Teritip menurut klasifikasi penduduk

berdasarkan tingkat pendidikan. Berikut ini tabel klasifikasi penduduk berdasarkan tingkat pendidikan:

TABEL VI
Klasifikasi Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	SD	7.178	30,98 %
2	SLTP	1.311	5,66 %
3	SLTA	756	3,26 %
4	Perguruan tinggi	195	0,84 %
5	Belum Sekolah	5.346	23,07 %
6	Tidak Tamat SD	8.386	36,19 %
	Jumlah	23.172	100 %

Sumber Data : *Kantor Carnal Simpang Teritip 2010*

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui klasifikasi penduduk menurut jenjang pendidikannya. Dari label di atas, tingkat pendidikan masyarakat yang paling banyak pada saat penelitian ini adalah tingkat SD yaitu sejumlah 7.178 orang atau 30,98 %. Sedangkan tingkat pendidikan yang masih sangat minim adalah tingkat perguruan tinggi yaitu sejumlah 195 orang atau 0,84 %. Adapun warga yang belum sekolah berjumlah 5.346 orang atau 23,07 %, dan yang tidak tamat SD berjumlah 8.386 orang atau 36,19 %.

B. Asal Usul Suku Melayu Jerieng.

Masyarakat Melayu Jerieng mengklaim masuk dalam rumpun Melayu, dan Melayu Jerieng sendiri memiliki sejumlah anak suku seperti Suku Pacor (suku ini berada di desa Pelangas, Simpang Gong, Simpang Tiga, Kundi sebagian, dan

Peradong), Punggur (desa Pangek), Baler (desa Air Nyatoh Kecamatan Simpang Teritip dan desa Pisang Kecamatan Kelapa), Jeramik (desa Ibul) Jerieng Tutuk (desa Berang, Rajek, Belar, Cerengge, Rumpis dan sekitarnya), dan suku anak lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu.²

Sedangkan mengenai asal-usul suku Jerieng terdapat beberapa pendapat sebagaimana berikut:

Hasan bin Ali (70) sebagaimana dikutip Sardi, menceritakan pada zaman Kerajaan Sriwijaya ada salah seorang pendekar mengasingkan diri bersama istrinya ke Pulau Bangka. Tepatnya di sekitar kaki Gunung Maras. Kononsepasang pendekar ini melahirkan 12 anak yang setelah besar mengembara ke pelosok Pulau Bangka. Anaknya yang bernama Jerieng mengembara ke daerah Bangka Barat kemudian menetap di sekitar Sungai Besar (Sungai Jerieng).³

Pendapat yang berbeda disampaikan oleh Suhaimi Sulaiman, ia mengatakan asal-usul suku Jerieng bermula diasingkannya dua orang putraputri Kerajaan Melayu yang telah melanggar titah kerajaan. Pengasingan disertai dengan sejumlah dayang-dayang dan prajurit kerajaan. Adapun tempat pengasingan tersebut berada di Pulau Bangka bagian barat. Kini tempat pengasingan putra-putri kerajaan itu disebut warga setempat sebagai tanah tua. Di tanah tua inilah putra-putri kerajaan ini menjalani penghidupan dan mendirikan sebuah kerajaan kecil. Hingga sekarang tanah tua ini masih dianggap warga setempat sebagai wilayah yang sakral.⁴

Buman bin Budin (71 tahun) menceritakan asal usul Suku Jerieng

² Sardi al -Palangasi, *op.cit*, h. I

³ Sardi, *Sejarah dan Islamisasi Desa Pelangas Kec. Simpang Teritip*, (Tangerang, Skripsi Dakwah ND!, 1999), h. 7

⁴ Suhaimi Sulaiman, Ketua Lembaga Adat Negeri Scrumpun Sebalai Propinsi Kepulauan Bangka Witting, *Wawancara*, Kamis 8 April 2010

sebagaimana yang diceritakan orang terdahulu, terjadi ratusan tahun lalu ketika terjadi banjir besar yang menenggelamkan bumf. Musibah besar itu membuat sepasang kekasih pangeran kerajaan masuk ke dalam sebuah benda yang berbentuk gelabang besi.⁵ Banjir bandang tersebut kemudian membawa sepasang kekasih ke Pulau Bangka bagian barat, sekarang tempat bermukimnya sepasang kekasih itu disebut tanah tua oleh orang Jerieng. Tanah tua ini secara administratif pemerintahan terletak di desa Air Menduyung. Sepasang kekasih ini kemudian beranak pinak hingga sampai sekarang. Pada waktu terjadinya banjir bandang Pulau Bangka dengan Pulau Sumatera dan Asia Tenggara masih suatu hamparan.⁶

C. Keberadaan Hukum Adat Melayu Jerieng.

Propinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah salah satu daerah yang memiliki hukum adat. Van Vollenhoven, dalam bukunya *Adatrecht I* sebagaimana yang dikutip R. Soepomo membagi seluruh daerah Indonesia di dalam 19 lingkaran hukum, yaitu: *"Aceh, tanah Gayo, 'Minangkabau, .Sumatera Selatan, Daerah Melayu, Bangka Belitung. Kalimantan, Minahasa. Gorontalo, Toraja, Sulawesi Selatan, Kepulauan Ternate, Maluku, Irian, Kepulauan Timor, Bali (Lombok), Jawa Tengah dan Timur, Swapraja dan Jawa Barat."*⁷ Ini

⁵ Gelabang adalah sebutan untuk sebuah benda yang berbentuk gong berukuran besar

⁶ Buman bin Budin, (tokoh masyarakat Melayu Jerieng) *Wawancara*, April 2010 R

⁷ R. Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, (Jakarta: Karista, 2007), h. 60

menunjukkan bahwa kepulauan Bangka Belitung merupakan salah satu wilayah yang memiliki hukum adat.

Ichsan Mokoginta dan Ryan paling tidak menyebutkan di Pulau Bangka *"ada lima kelompok masyarakat hukum adat yang string disebut-sebut dan dikenal luas yakni; Orang Loin, Sekak, Sawang, Jering dan Kedcilek"*.⁸

Sebetulnya hukum adat menurut Bushfar Muhammad, baru muncul pada abad 17, Inlioni (doh Ridjah vanp, mcmhuai lul. i .ati icuiany, Ilnu Pulau Ambon clan pada tahun 1676 oleh Amannad tentang pelavaran orang Wajo Bugis.⁹ Sedangkan istilah hukum adat ini baru populer pada abad keduapuluh Masehi dengan lahirnya ilmu hukum adat oleh penyelidikan Van Volenhoven.¹⁰

Dari berbagai pendapat di atas bisa dirumuskan bahwa hukum adat telah ada sejak adanya peradaban di dunia ini, setiap kelompok adat atau suku memiliki hukum tersendiri. Dengan demikian, masyarakat Melayu Jerieng termasuk pula daerah yang memiliki hukum adat.

⁸Ichsan mokoginta dan Ryan paling, *"Masvarakat Hukum Adat Semakin Terdesak"* (online)
:http://awfw.fx)belitung.com

⁹ Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar*, (Jakarta: Karista, 2006),
h. 57

¹⁰ *bid*, h. 149

D. Fungsi Hukum Adat Melayu Jerieng.

Flukum adat bertujuan memelihara dan melestarikan keharmonisan antarwarga, lingkungan, dan alam sekitar. Muhammad Daud Ali mengatakan: "tujuan hukum adat adalah untuk menyelenggarakan kehidupan masyarakat yang aman, tentram dan sejahtera."¹¹ Sedangkan menurut Abdullah, tujuan hukum adat adalah untuk menjaga *tanah ayek* (tanah air) dari kebinasaan. Dengan ditegakkannya hukum adat maka akan selalu terjaga keamanan, ketenteraman, kedamaian, dan keharmonisan dalam lingkungan hukum adat.¹²

E. Sumber flukurn Adat Melayu Jerieng.

Tentang sumber hukum adat suku Jerieng, Abdullah mengatakan hukum yang telah berlaku sejak nenek moyang itu ialah hasil pergaulan dan sistem nilai masyarakat.¹³ Lain halnya dengan Suhaimi Sulaiman. hukum adat yang ada di Bangka dan Belitung bersumber dari kitab *Sindang Mardike* yang disusun oleh Pangeran Sida Ing Kenaian pada masa Susuhan Abdurrahman (1667-1702) pada Kesultanan Palembang.¹⁴

Sesependapat dengan Suhaimi, Zulkarnain Karim mengatakan hukum adat Bangka

¹¹ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Hukum Islam dan Tata Hukum Islam di Indonesia*

¹² Abdullah, (tctua adat suku Jerieng Raja), *Wawancara*, Minggu 11 April 2010

¹³ Abdullah, (tctua adat suku Jerieng Raja), *Wawancara*, Minggu 11 April 2010

¹⁴ Suhaimi Sulaiman, Ketua Lembaga Adat Negeri Serumpun Sebalai Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, *Wawancara*, Kamis 8 April 2010

berasal dari Undang-undang Sindang Mardike yang disusun oleh Susuhunan Abdurrahman dari Kesultanan Palembang pada tahun 1667. Sebagai pusat pengaturan Undang-undang Sindang Mardike berada di Mentok dan dikepalai oleh seorang yang bergelar Ranga, Menteri Ranga pertama adalah Encek Wan Usman.¹⁵

F. Asal-Usul Aturan Adat Dalam Suku Melayu Jerieng

Menurut sejarahnya, aturan adat dalam suku Melayu Jerieng bermula ketika pengaruh animisme dan dinamisme masih kuat. Kepercayaan animisme dan dinamisme pada waktu itu mengajarkan sikap hormat terhadap orang tua, orang yang dituakan dan ketua adat.¹⁶ Masyarakat sangat hormat dan patuh kepada tokoh-tokot adat yang dianggap mempunyai kekuasaan untuk mengatur kehidupan masyarakat, karena tokoh-tokoh adat adalah tempat masyarakat mengadukan dan menyelesaikan persoalan bila terjadi suatu perkara.

Kemudian sejalan dengan datangnya ajaran Islam, pengaruh animisme dan dinamisme ini masih tetap ada, sehingga sampai sekarangpun pengaruhnya masih terlihat. Seperti contoh, ajaran Islam mengajarkan kepada pemeluknya untuk saling hormat menghormati sesama, hormat kepada yang tua dan sayang kepada yang muda, terlebih kepada para ulama dan kyai sikap hormat harus dijaga.

¹⁵ Suhaimi Sulaiman, Ketua Lembaga Adat Negeri Scrumpun Sehalai Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, *Iflowancro*, Kamis 8 April 2010

¹⁶ Sardi Al-Palangasi, *loc.cit*

Menurut Jasin Mirip, dengan berbaurnya kepercayaan animisme dan dinamisme dengan ajaran Islam, sikap tersebut masih melekat, sehingga terhadap tokoh-tokoh adat mereka sangat menghormatinya. Setiap aturan yang dibuat oleh tokoh-tokoh adat, sangat dipatuhi masyarakat. Semua yang dianjurkan akan dilaksanakan dan apa yang dilarang akan mereka tinggalkan.¹⁷

Demikian sekilas tentang keadaan suku Melayu Jerieng yang menerangkan keadaan secara umum baik geografis dan demografis, serta penjelasan tentang asal usul suku Melayu Jerieng, keberadaan hukum adat Melayu Jerieng, tujuan hukum adat Melayu Jerieng, sumber hukum adat Melayu Jerieng, asal-usul aturan adat dalam suku Melayu Jerieng.

¹⁷ Jasin Mirip, (tokoh adat Melayu Jerieng), *Waswancara*, Sabtu 1 Mei 2010

BAB III

TINJAUAN PERKAWINAN SUKU MELAYU JERIENG DAN PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM

A. Tinjauan Perkawinan Suku Melayu Jerieng

1. Sejarah Perkawinan Suku Melayu Jerieng

Menurut Sardi bin Buman, sejarah perkawinan pada suku Melayu Jerieng bermula dari dua orang bersaudara laki-laki dan perempuan yang hanyut oleh banjir besar dengan menggunakan sebuah perahu. Setelah banjir reda keduanya terdampar di tanah tua masuk wilayah tanah Melayu Jerieng, kemudian keduanya tinggal di daerah tersebut. Setelah beberapa lama menetap, keduanya ingin melangsungkan perkawinan. Menurut cerita, keduanya dikawinkan oleh seorang musafir yang sedang melewati tempat pengasingan tersebut yang terjadi sekitar tahun 1772.¹

Lain halnya dengan Suhaimi Sulaiman, menurutnya sejarah perkawinan Melayu Jerieng bermula diasingkannya dua orang putra-putri kerajaan Melayu Sriwijaya yang telah melanggar titah kerajaan. Kemudian keduanya diasingkan ke pulau Bangka bagian barat pada tempat yang sama. Setelah beberapa lama keduanya menetap di tempat tersebut, mereka ingin melangsungkan perkawinan. Kemudian mereka dikawinkan

¹ Sardi bin buman, (ketua Lembaga Adat Melayu Jerieng), *Wawancara*, Jum'at 28 Mei

oleh seorang lelaki tua yang sudah sejak lama menetap di tempat pengasingan tersebut, sehingga dari perkawinan inilah keduanya berketurunan yang kelak menjadi cikal bakal masyarakat Melayu Jerieng.²

2. Bentuk-Bentuk Perkawinan Pada Suku Melayu Jerieng

a. Perkawinan Buyong

Buyong artinya kawin dengan kerabat dekat.³ Disebut buyong karena perkawinan ini terjadi di antara sesama kerabat yang masih tergolong keluarga dekat. Perkawinan semacam ini tidak diperbolehkan atau dilarang menurut adat Melayu Jerieng.

Menurut Sardi bin Buman, silsilah kekeluargaan pada masyarakat suku Melayu Jerieng yang menyebabkan buyong menurut urutannya adalah sebagai berikut:

- 1) **Ibu** kandung. Ibu kandung merupakan yang paling dekat hubungan kekerabatannya. Seorang laki-laki diharamkan mengawini ibu kandungnya sebagaimana keharaman dalam Hukum Islam. Haram mengawini ibu menyebabkan haram pula mengawini nenek (ibunya ibu).
- 2) Anak perempuan. Termasuk juga cucu; baik cucu dari anak laki-laki maupun dari anak perempuan.

² Suhaimi Sulaiman, (Ketua Lembaga Adat Negeri Serumpun Sebalai Provinsi Kepulauan Bangka Belitung), *Wawancara*, Kamis 8 April 2010

³ Sardi Al-Palangasi, *op. cit.*, 42

- 3) Saudara perempuan.
- 4) Anak saudara. Baik dari saudara laki-laki maupun dari saudara perempuan. Hubungan kerabat dengan anak saudara dapat menyebabkan buyong karena is merupakan kemenakan yang paling dekat hubungan kekerabatannya. Termasuk pula cucu dari saudara.
- 5) Saudara bapak dan saudara ibu (bibi dari pihak ayah dan bibi dari pihak ibu). Sepupu bapak dan sepupu ibu. Termasuk juga didalamnya orang tua sepupu bapak
- 6) dan orang tua sepupu ibu.
- 7) Saudara sepupu dari pihak bapak ataupun dari pihak ibu beserta keturunannya yang perempuan.
- 8) Anak perempuan sepupu laki-laki.⁴

Demikian urutan perempuan-perempuan yang di larang mengawininya menurut hukum adat Melayu Jerieng. Tingkatan-tingkatan tersebut berdasarkan kedekatan hubungan kekerabatannya.

b. Perkawinan Biasa

Menurut Sardi bin Buman, bentuk perkawinan pada suku Melayu Jerieng selain perkawinan buyong tidak ada perbedaan dengan

⁴ Sardi bin buman, (ketua Lembaga Adat Melayu Jerieng), *Wawancara*, Jum'at 28 Mei

perkawinan pada umumnya.⁵ Masih menurut Sardi, yang dari perkawinan biasa adalah adanya larangan pada perkawinan buyong berikut sanksi adat yang dikenakan bagi pelakunya.

Begitu juga menurut Jasin Mirip, bentuk perkawinan pada suku Melayu Jerieng dibedakan karena adanya larangan pada perkawinan buyong sedangkan pada perkawinan biasa mengikuti bentuk perkawinan secara umum.⁶

Dalam pelaksanaannya, kedua bentuk perkawinan ini tidak ada perbedaan sama sekali, baik perkawinan buyong maupun perkawinan biasa sama-sama dilakukan melalui beberapa tahap, seperti pengenalan, ngelamar, ijab, perkaseh, dan walimahan.⁷

Pengenalan yang disebut juga ngerintis, yaitu pertemuan mudamudi. Pada tahapan berikutnya kedua pihak saling memperkenalkan pada orang tua masing-masing.⁸

Tahapan selanjutnya ngelamar dan ijab. Pelaksanaan ngelamar atau peminangan ini dilakukan pada waktu yang telah ditentukan dan disepakati oleh kedua belah pihak. Setelah peminangan diterima, maka

⁵ *Ibid*

⁶ Jasin Mirip, (tokoh adat Melayu Jerieng), *Wawancara*, Sabtu 1 Mei 2010

⁷ Sardi Al-Palangasi, *op.cit*, h. 19

⁸ *Ibid*, h. 20

ditentukanlah hari pelaksanaan ijab atau akad nikah.⁹ Pada tahapan ini kedua mempelai melakukan perkaseh, yaitu kedua mempelai disuruh duduk berhadapan oleh seorang ketua adat, seraya dibacakan do'a kepada kedua mempelai.¹⁰

Tahapan selanjutnya adalah acara walimahan. Walimahan atau acara perayaan pesta pernikahan diadakan di rumah mempelai perempuan. Biasanya mempelai laki-laki dijemput menuju rumah mempelai perempuan dengan diiringi sanak keluarga dan kerabat.¹¹

B. Perkawinan Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Perkawinan.

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata kawin yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.¹² Perkawinan disebut jugapernikahan, berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh.¹³

⁹ *Ibid*,

¹⁰ *Ibid*

¹¹ *Ibid*, h. 21

¹² Dep Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), Cet. Ke-3, h. 456

¹³ Muhammad bin Isma'il A1-Kahalaniy, *Subulus Salam*, (Bandung: Dahlan, th), jillid 3,

Al- Azhary mengatakan: akar kata nikah dalam ungkapan bahasa Arab berarti hubungan badan.¹⁴ Sementara Al-Farasi mengatakan: "Jika mereka mengatakan, bahwa si fulan atau anaknya fulan menikah, maka yang dimaksud adalah mengadakan akad. Akan tetapi, jika dikatakan, bahwa Ia menikahi istrinya, maka yang dimaksud adalah berhubungan badan. Dengan demikian, kata nikah dalam perbendaharaan bahasa Arab mempunyai dua arti, dapat digunakan dalam arti akad dan dapat juga berarti hubungan badan atau bersetubuh.

2. Prinsip-prinsip Perkawinan.

Islam ingin membangun masyarakat yang patut menjadi contoh. Inilah sebabnya Islam sangat memperhatikan masalah keluarga. Dalam membina rumah tangga, setiap Muslim harus mempunyai landasan yang kuat. Apabila landasan keluarga ini kuat, niscaya landasan Negara akan kuat pula. Untuk mencapai semua ini, perkawinan dalam Islam mempunyai prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan oleh setiap Muslim.

Adapun prinsip-prinsip perkawinan dalam Islam, antara lain:

a) Memenuhi dan melaksanakan perintah agama.

Perkawinan dalam Islam merupakan sunnah Rasulullah s.a.w. karena itu agama Islam sangat menganjurkan kepada umatnya untuk

¹⁴ Kamil Muhammad `Uwaidah, *Fiqih Wanita*, pentj. M Abdul goffar E.M, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998), Cet. Ke-1, h. 375.

melaksanakan perkawinan. Itu berarti bahwa melaksanakan perkawinan merupakan pelaksanaan dari ajaran agama. Agama mengatur perkawinan, mengatur syarat dan rukun perkawinan yang harus dipenuhi. Apabila syarat dan rukun tidak dipenuhi, maka perkawinan itu batal atau fasid. Demikian pula agama memberi ketentuan lain di samping syarat dan rukun, seperti harus adanya mahar dalam perkawinan, dan juga harus adanya kemampuan.¹⁵

b) Kerelaan dan persetujuan.

Sebagai upaya menjalin ikatan rumah tangga yang harmonis, maka perkawinan dalam Islam mengenal prinsip kerelaan dan persetujuan dari pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Pihak yang ingin melangsungkan perkawinan tidak dalam keadaan dipaksa. Kerelaan dan pihak yang akan melangsungkan perkawinan dapat dilihat dengan jelas dari tindakan dan ucapannya. Sedangkan bagi calon istri, wujud dan kerelaannya cukup dengan diamnya sudah menjadi isyarat bahwa ia menyetujuinya, sebagaimana dalam sebuah hadits Nabi s.&w. pernah bersabda:

Artinya: *"Dan Abi Hurairah r. a. bahwasanya Rasulullah s. a. w. bersabda, "Janganlah dikawinkan seorang perempuan janda sehingga ia diajak berembuk dan jangan pula dikawinkan seorang gadis sehingga ia dimintai izin." Para sahabat bertanya, Wahai Rasulullah, bagaimana*

¹⁵ lihat Abd. Rahman Ghazaly, *op.cit*, h. 108

mendapatkan izinnya? Rasulullah bersabda, "Apabila is dram. "(HR. Bukhari dan Muslim). Lafaz hadits menurut Bulchari.¹⁶

Berdasarkan sabda Nabi di atas, jelas bahwa kerelaan calon istri harus diperhatikan dan nyatalah bahwa kerelaan persetujuan kedua pihak merupakan hal yang penting.

c) Perkawinan Untuk Selamanya.

Prinsip perkawinan yang terpenting dalam Islam adalah bahwa menikah itu untuk selamanya bukan hanya untuk satu masa tertentu saja. Perkawinan adalah pertalian yang seteguh-teguhnya dalam hidup dan kehidupan manusia. Menjalin hubungan yang kuat antara suami istri dengan maksud membina hubungan yang permanen dalam ikatan perkawinan mitsacion ghalidlon karena mengharapkan ridha Allah SWT.

3. Larangan Perkawinan.

Syari'at Islam telah mengatur larangan-larangan dalam perkara perkawinan secara lengkap dan ideal bagi seorang Muslim. Untuk mencapai tujuan yang ideal ini, syari'at menjelaskan macam-macam larangan dalam perkawinan. Perempuan mana saja yang dilarang dinikahi dan

¹⁶ Abu Abdillah Muhammad bin Isma'il Al-Bukhari, *Shohihul Bukhari: "Bab La Yunkihul Abu Wa Ghairuhu Albikra Wats Tsaiiba 11la Bi Ridlaha,"* (Semarang: Toha Putra, th), Juz. 6, h. 135

sebaliknya perempuan mana saja yang boleh dinikahi oleh seorang Muslim, karena dalam ajaran Islam tidak semua perempuan boleh dinikahi.

Secara garis besar, larangan perkawinan antara seorang dan seorang perempuan menurut syara' dibagi ke dalam dua kategori, yaitu larangan yang bersifat tetap atau abadi (mahram mu'abbad) dan larangan yang berlaku sementara (mahram mu aqqad).

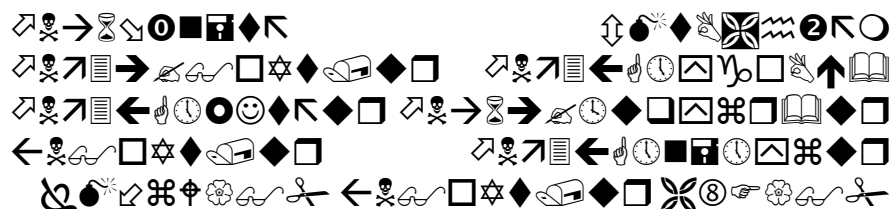
a. Larangan yang bersifat tetap atau abadi (mahram mu'abbad).

Status mahram mu'abbad berlaku untuk selamanya dalam arti seorang diharamkan menikahi seorang perempuan sampai kapanpun dan dalam keadaan apapun keduanya diharamkan melaksanakan pernikahan. Di antara sebab mahram mu'abbad adalah karena hubungan nasab, karena hubungan pernikahan (hubungan mushahharah), hubungan persusuan.

Adapun macam-macam mahram mu'abbad adalah sebagai berikut:

1. Mahram karena hubungan nasab.

Wanita-wanita yang haram dinikahi karena hubungan nasab berdasarkan firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 23:



Artinya: "Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang

perempuan...."¹⁷

Berdasarkan ayat diatas, perempuan yang termasuk mahram yaitu ibu, anak perempuan, saudara perempuan, bibi (saudara bapak atau saudara ibu), kemenakan perempuan. Dalam penjabarannya, perempuan-perempuan tersebut termasuklah dalam pengertian berikut:

- a) Ibu, ibunya ibu, ibunya ayah, dan seterusnya dalam garis lures ke atas.
- b) Anak, anak dari anak laki-laki, anak dari anak perempuan, dan seterusnya ke bawah menurut garis lurus ke bawah.
- c) Saudara, baik kandung, seayah, atau seibu.
- d) Saudara ayah, baik hubungannya kepada ayah secara kandung, seayah atau seibu; saudara kakek, baik kandung, seayah atau seibu, dan seterusnya menurut garis lurus ke atas.
- e) Saudara ibu, baik hubungannya kepada ibu secara kandung, seayah atau seibu; saudara nenek kandung, seayah atau seibu, dan seterusnya dalam garis lurus ke bawah.
- f) Anak saudara laki-laki kandung, seayah atau seibu; cucu saudara laki-laki sekandung, seayah atau seibu, dan seterusnya dalam garis lurus ke bawah.
- g) Anak saudara perempuan, baik kandung, seayah atau seibu; cucu

¹⁷ Departemen Agama, *loc.cit*

saudara kandung, seayah atau seibu, dan seterusnya dalam garis lurus ke bawah.¹⁸

2. Mahram karena hubungan perkawinan (mahram mushahharah).

Larangan kawin karena hubungan mushahharah disebutkan

dalam lanjutan surat An-Nisa ayat 23:



Artinya :ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang Telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu).¹⁹

Dari keterangan ayat di atas, yang termasuk ke dalam golongan perempuan yang haram dinikahi karena hubungan perkawinan dapat diperinci sebagai berikut:

¹⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2007), Cet. ke-2, h. 111.

¹⁹ Departemen Agama, /oc.cit

a) Mertua perempuan.

Apabila seorang laki-laki menikahi seorang perempuan, maka ibu istri haram dinikahnya. Termasuk pula ke dalam mertua ini adalah nenek dari istri (baik baik dan pihak ayah maupun dan pihak ibu) dengan semua tingkatannya.²⁰

b) Anak tiri perempuan.

Anak tiri termasuk mahram mushahharah dengan syarat telah terjadi hubungan kelamin antara suami dengan ibu anak tersebut.²¹ Namun apabila keduanya belum bercampur, maka tidaklah mengapa menikahi anak tiri. Misalnya, sehabis menikahi ibunya, suami belum sempat mencampuri si istri telah meninggal dunia, dibolehkan menikahi anaknya karena tidak jadi dengan ibunya. Tetapi kalau ibunya sudah pernah dicampuri lalu bercerai, dan sehabis bercerai janda tersebut mati, maka tidak boleh anaknya dinikahi, sebab dia telah menjadi mahram, karena suami telah menyetubuhi ibunya.²²

Kalimat "anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari

²⁰ Sayyid Sabiq, *op.cit*, It 292.

²¹ *bid.* lihat pula Abd. Rahman Ghazaly, *op.cit*, h. 108.

²² Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, (Jakarta: PT. Pustaka Panjimas, 1983), Juz 4, Cet. Ke-1, h.308.

isteri yang telah kamu campuri" pada ayat di atas, yang dimaksud dalam kalimat tersebut menurut jumhur ulama termasuk juga anak tiri yang tidak dalam pemeliharaannya. Masuk juga dalam kategori ini cucu perempuan istri (baik dari anak laki-laki maupun anak perempuan).

c) Menantu perempuan.

Menantu, yakni istri anak masuk ke dalam mahram mashahharah. Termasuk pula istri cucu (baik dari anak laki-laki maupun anak perempuan).

d) Ibu tiri.

Maksudnya adalah istri ayah yang bukan ibu kandung meskipun sudah bercerai dari ayah. Bahkan dalam hal ini, menurut Sayyid Sabiq seorang laki-laki tidak diperbolehkan untuk menikahi istri ayahnya, meskipun belum terjadi hubungan kelamin di antara keduanya.²³

3. Mahram karena hubungan persusuan.

Diharamkan menikahi perempuan sepersusuan sebagaimana halnya diharamkan wanita karena hubungan nasab. Perempuan-perempuan yang termasuk ke dalam golongan ini dipersamakan kedudukannya dengan setiap perempuan yang haram dinikahi karena hubungan nasab, berdasarkan bunyi ayat:

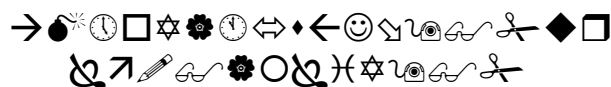
²³ Sayyid Sabiq, */oc.cit*

Keharaman mengumpulkan dua wanita dalam satu ikatan perkawinan juga berlaku terhadap dua orang perempuan yang mempunyai hubungan keluarga, seperti seorang perempuan dengan bibinya, baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu, berdasarkan keterangan sebuah hadits Nabi saw yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yang berbunyi:

Artinya : *"Dart Abi Hurairah r.a. bahwasanya Rasulullah s.a.w. bersabda, " Tidak boleh dimadu antara seorang perempuan dengan saudara perempuan ayahnya dan antara seorang perempuan dengan saudara perempuan ibunya."(HR. Bukhari dan Muslim). Lafaz hadits menurut Bulchhari.*²⁷

b. Wanita berstatus istri orang lain.

Seorang laki-laki tidak boleh menikahi wanita yang masih terikat hubungan perkawinan dengan laki-laki lain. Haramnya menikahi wanita dalam kondisi ini disebutkan dalam surat AnNisa ayat 24:



Artinya: *"Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami . . ."*²⁸

Seorang Muslim diharamkan menikahi wanita yang berstatus istri orang lain, sebagai bentuk perhormatan atas hak-hak suami dari perempuan tersebut. Bahkan pada masa peminangan pun, seorang

²⁷ Bukhari, *op.cit*, Bab La Tunkahul Mar 'atu 'Ala Ammatiha, h. 128

²⁸ Departemen Agama, *op.cit*, h. 65

Muslim dilarang meminang seorang wanita dalam pinangan orang lain. Rasulullah s.a.w dalam sebuah hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Umar:

Artinya: *"Ibnu Umar r.a. berkata: Rasulullah s.a.w bersabda, 'Janganlah seseorang dari kamu meminang atas pinangan saudaramu sehingga peminang pertam meninggalkannya atau telah mengizinkannya.'"* (HR. Bukhari dan Muslim). Lafaz hadits menurut Bulchari.²⁹

Keharaman menikahi wanita dalam kondisi ini hanya bersifat sementara. Setelah wanita tersebut tidak berstatus istri orang lain lagi, maka dibolehkan bagi seorang laki-laki yang ingin menikahinya. Larangan tersebut masih tetap berlaku meskipun dalam masa `iddah si wanita, karena menikahi wanita yang masih dalam masa iddah diharamkan, baik `iddah cerai maupun `iddah karena ditinggal mati suaminya.³⁰

c. Wanita yang sedang melakukan ihrom.

Wanita yang sedang melakukan ihrom baik ihrom umroh maupun ihrom haji, tidak boleh dikawini. Keharaman menikahi wanita yang sedang dalam keadaan ihrom berdasarkan hadits Nabi s.a.w. yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Usman bin `Affan:

²⁹ Al-Bukhari, *op.cit:* " Bab La Yakhtub Ala Khitbati Akhihi Hatta Yankiha Au Yada 'a, h.137

³⁰ Abd. Rahman Ghazaly, *op.cit*, hal. 113

Artinya: *"Dari Utsman r.a. berkata, Rasulullah s.a.w. bersabda, "Orang ihram tidak boleh menikah dan tidak boleh menikahkan." (HR. Muslim).*³¹

Berdasarkan hadits di atas, Imam Syafi'i, Ahmad, dan Ishak berpendapat bahwa akad nikah yang dilakukan oleh seseorang yang sedang dalam keadaan ihrom hukumnya tidak sah.³²

d. Wanita Musyrik.

Adapun ketentuan larangan menikahi wanita musyrik berdasarkan firman Allah s.w.t. dalam surat Al-Baciarah ayat 221:

Artinya: *"Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya...."*³³

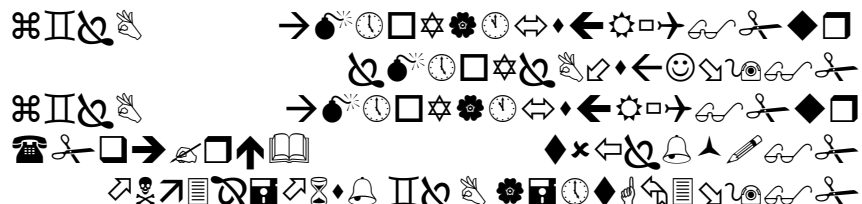
Yang dimaksud wanita musyrik pada ayat diatas ialah wanita yang menyembah selain Allah. Para ulama sepakat bahwa seorang Muslim dilarang menikah dengan perempuan yang menyembah berhala, ateis, murtad, serta aliran-aliran sesat lainnya. Adapun wanita ahli kitab, yakni wanita Nashrani dan wanita Yahudi boleh dikawini, berdasarkan

³¹ Muslim, *Shohih Muslim: "Bab: Tahrimi Nikahi Al-Muhrimi Wa Karohati Khitbathihi,"* (Bandung: Dahlan, th), juz. 1, h. 590

³² Sayyid Sabiq, *op.cit*, h 321

³³ Departemen Agama, *op.cit*, h 27

firman Allah dalam surat Al-Ma'idah ayat 5, yang berbunyi:



 Artinya: "...(*dan Dihalalkan mengawini*) wanita yang

menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang

beriman dan wanita-wanita yang menjaga

kehormatan di antara orang-orang yang diberi

Al kitab sebelum kamu ..."³⁴

3. Tujuan Perkawinan.

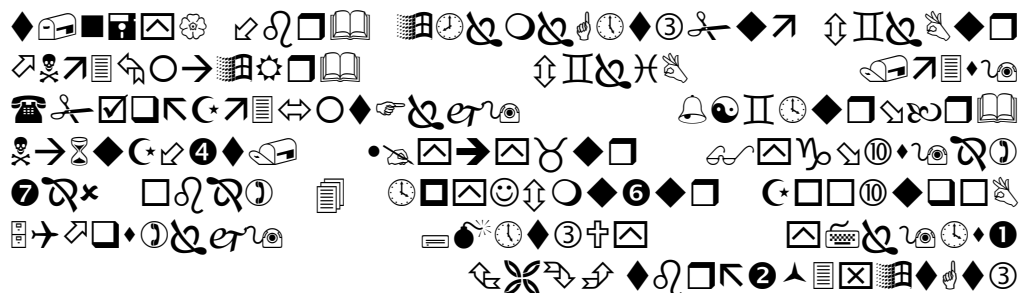
Allah telah menciptakan pada diri manusia itu tabi'at mempunyai daya tarik antar lawan jenis, sehingga dengan adanya rasa ketertarikan terhadap lawan jenis, maka masing-masing timbul keinginan untuk berkumpul dan berdekatan dengan yang lain.

Dalam membina hubungan tersebut, Allah menghendaki agar manusia menjalaninya dengan cara-cara yang baik dan sah, agar tidak terjadi kerusakan di antara manusia. Hubungan yang baik menurut Allah adalah hubungan yang sah yang terjalin dari ikatan perkawinan yang sah pula. Dengan demikian, wadah terbaik untuk dapat berhubungan yang sah dalam pandangan Islam adalah lembaga perkawinan.

Perkawinan menurut pandangan Islam, tidak terlepas dari hikmah Allah menciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi, untuk memakmurkan alam.

³⁴ Departemen Agama, *ibid*, h 86

Allah telah menciptakan laki-laki dan wanita agar dapat berhubungan satu sama lain, saling mencintai, menghasilkan keturunan, dan hidup berdampingan secara damai dan sejahtera di muka bumi sesuai dengan petunjuk Allah dan petunjuk Rasulullah. Allah SWT berfirman dalam AlQuran surat Ar-Rum ayat 21:



Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."*³⁵

Islam menganjurkan kepada umatnya agar melangsungkan pernikahan.

Rasulullah s.a.w. merupakan teladan bagi setiap Muslim sangat menganjurkan kepada kaum muda yang sudah berkeinginan dan mampu menikah, maka hendakkah is menikah. Dalam hadits Bukhari dan Muslim, dari Abdullah ibnu Mas'ud r.a. bahwasanya Rasulullah s.a.w. bersabda:

Artinya: *"Dari Abdullah bin Mas'ud r.a. berkata, Rasulullah s.a.w. bersabda kepada Kami, "Wahai kaum muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berumah tangga, maka kawinlah, karena kawin dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barangsiapa belum mampu, maka hendakkah berpuasa, karena yang demikian dapat mengendalikanmu."* (HR. Bukhari dan Muslim).

³⁵ *bid*, h. 234

Lafadz hadits menurut Bukhari.³⁶

Pernikahan adalah sebuah lembaga untuk membina rumah tangga, selaras dengan tabi'at manusia yang mempunyai naluri seksual yang cenderung menggerakkan rasa dan mendorong kepada hasrat menjalin hubungan dengan lawan jenis.

Sesungguhnya naluri seksual merupakan naluri yang sangat kuat yang selalu mengarahkan manusia untuk berusaha mencari sarana untuk menyalurkannya. Jika tidak terpenuhi, dia akan dihinggapai rasa gelisah yang berkelanjutan bahkan bisa terjerumus pada hal-hal yang tidak baik. Dengan perkawinan, maka manusia akan dapat menyalurkan rasa kasih sayang dan kebutuhan biologisnya dengan jalan halal.

Tujuan pernikahan juga dimaksudkan agar dapat menjaga pandangan mata dan hal-hal yang dilarang, memelihara kemaluan dan menjauhkan manusia dan bentuk-bentuk hubungan yang tercela, dan beralih pada sesuatu yang dihalalkan Allah SWT.

Dengan disyariatkannya perkawinan, manusia dapat menjalani hidupnya sesuai dengan fitrah yang ada dalam dirinya dan dapat menghindari terputusnya garis keturunan. Di samping itu, diri para perempuan juga dapat terjaga dan pemuas nafsu setiap laki-laki yang menginginkannya. Perkawinan juga dapat membentuk rumah tangga dengan kelembutan seorang ibu dan kasih sayang seorang ayah, sehingga dapat memberikan keturunan yang baik. Perkawinan

³⁶ A1-Bukhari, *op.cit*: "*Bab Man Lam Yastati 'i Alba 'ata Falyashum*", h. 117

seperti inilah yang mendapatkan keridhaan dan Allah SWT dan diinginkan oleh Islam.

BAB IV
SANKSI HUKUM DALAM ADAT BUYONG
PADA SUKU MELAYU JERIENG

A. Latar Belakang Munculnya Sanksi Hukum Dalam Adat Buyong.

Dalam masyarakat Melayu Jerieng terdapat bentuk perkawinan kerabat yang disebut buyong. Perkawinan ini merupakan perkawinan terlarang, sehingga bagi warga Melayu Jerieng yang tetap melaksanakannya akan dikenakan sanksi. Larangan clan sanksi tersebut ditujukan apabila pasangan yang melakukan perkawinan termasuk ke dalam golongan kerabat atau menurut istilah suku Melayu Jerieng juga dikenal dengan perkawinan sedarah.

Apabila ada warga yang melakukan perkawinan buyong maka para tokoh adat bertindak memberi sanksi kepada pasangan tersebut. Biasanya warga yang akan melangsungkan perkawinan buyong akan melaporkan ke balai pemangku adat tempat para tokoh adat melakukan musyawarah. Setelah menyampaikan kehendak melakukan perkawinan buyong, maka dimusyawarahkan waktu dilaksanakan hukumannya.¹

Setiap wilayah hukum adat mempunyai pemangku-pemangku adat yang berwenang menentukan hukuman atau sanksi atas pelanggaran adat. Apabila terjadi pelanggaran terhadap hukum adat, maka kepala adat mengambil tindakan kongkrit terhadap pelanggar adat.²

¹ Jasin Mirip, (Tokoh Adat Melayu Jerieng), *Wawancara*, Sabtu 1 Mei 2010

² Lihat R. Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, (Jakarta: Karista, 2007), h. 112

Dilaksanakannya hukuman atas pelanggaran hukum adat ini adalah sebagai reaksi atau koreksi adat dari para petugas hukum adat, dengan maksud mengadakan pembersihan masyarakat supaya kesulitan-kesulitan, baik yang bersifat lahiriyah maupun batiniyah dapat pulih kembali.³ Inilah yang merupakan maksud atau alasan adanya pelaksanaan hukuman bagi pelanggaran hukum adat.

Dalam hukum adat masyarakat Melayu Jerieng juga ditemukan alasan-alasan yang melatarbelakangi dilaksanakan hukuman atas pelanggaran hukum adat. Misalnya dalam hukum adat perkawinan, adanya aturan larangan melakukan perkawinan sesama kerabat dekat atau dengan seseorang yang berhubungan sedarah, perkawinan jenis ini disebut perkawinan buyong. Bagi warga yang melanggar larangan adat buyong ini, maka akan dikenakan sanksi. Menurut adat suku Melayu Jerieng, masyarakat dilarang melakukan perkawinan buyong, sehingga bagi warga Melayu Jerieng yang tetap melaksanakannya maka akan dikenakan sanksi adat.

Adapun yang melatarbelakangi adanya sanksi bagi warga yang melanggar larangan atau warga yang tetap melaksanakan perkawinan buyong dapat kita lihat pada pernyataan para tokoh adat suku Melayu Jerieng sebagaimana keterangan berikut ini:

³ *Ibid*, h. 119

Menurut Jasin Mirip⁴, maksud adanya sanksi yang diberikan oleh pemangku adat terhadap para pelaku buyong adalah supaya masyarakat takut melakukan perkawinan buyong, karena buyong merupakan perkawinan sedarah. Masih menurut Jasin, selain itu melanggar adat buyong adalah *pemalei* (pemali) dan pelanggaran terhadap adat ini akan menimbulkan ketidak teraturan dalam silsilah keluarga di kalangan keluarga dekat. Maka dengan demikian sanksi tersebut bertujuan mencegah warga melakukan perkawinan buyong guna menjaga ketertiban dalam silsilah kekeluargaan.

Ketua lembaga adat Melayu Jerieng, Sardi bin Buman, mengatakan bahwa latar belakang adanya sanksi dalam adat buyong ialah kehendak para tokoh adat guna memberi pelajaran bagi setiap warga Melayu Jerieng agar tidak terjadi perkawinan sedarah.

Jenis perkawinan yang sangat dikecam keras dan akan mendapat sanksi paling tegas adalah buyong aram, yaitu seorang laki-laki berani mengawini ibunya sendiri, karena menurut hukum adat Melayu Jerieng melakukan perkawinan buyong aram berarti sama saja perkawinan pada binatang, dimana anaknya bisa mengawini induknya sendiri. Jadi dengan adanya sanksi yang dikenakan kepada para pelakunya, maka diharapkan warga Melayu Jerieng tidak berani melakukan perkawinan buyong.⁵

Selanjutnya Sardi mengatakan bahwa sanksi hukum dalam adat buyong

⁴ Jasin Mirip, (Tokoh Adat Melayu Jerieng), *Wawancara*, Sabtu 1 Mei 2010

⁵ Sardi bin Buman, (Ketua Lembaga Adat Melayu Jerieng), *Wawancara*, Ahad 2 Mei

ini sudah berlangsung sejak lama. Konon, menurut cerita tokoh-tokoh adat secara turun temurun, nenek moyangnya suku Melayu Jerieng adalah dua orang suami istri yang berstatus saudara kandung. Namun pada waktu itu keduanya belum mengetahui tentang larangan melakukan perkawinan sedarah.

Kemudian pada masa anak keturunannya, yaitu sekitar tahun 1700-an, perkawinan buyong ini mengakibatkan terjadinya kekacauan silsilah keluarga atau nasab, sehingga dengan terjadinya ketidakteraturan tersebut maka para tokoh adat membuat aturan larangan melakukan perkawinan buyong beserta sanksi bagi warga yang melanggarnya.

Berdasarkan keterangan-keterangan para tokoh adat Melayu Jerieng tersebut, maka jelaslah bahwa adanya sanksi dalam adat buyong tersebut pada awal berlakunya dilatarbelakangi adanya keinginan para tokoh adat yang bertujuan memberi efek jera kepada seluruh masyarakat agar tidak lagi melakukan perkawinan buyong, sehingga silsilah keluarga Melayu Jerieng dapat teratur.

Sanksi-sanksi yang dikenakan kepada pelaku buyong tidak lain hanya sebagai penebus kesalahan —atau setidaknya dianggap telah melakukan kesalahan, karena melanggar larangan adat. Dengan adanya sanksi adat yang dikenakan kepada pelakunya maka akan dapat menebus kesalahan tersebut. Selain itu juga adanya sanksi tersebut bertujuan membuat rasa takut pada setiap warga sehingga mereka terhindar dari melakukan perkawinan di antara sesama kerabat dekat.

Larangan melakukan perkawinan kerabat apabila tidak diikuti dengan sanksi bagi yang melalculkan, maka tentu saja dalam penerapannya tidak akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu, dalam adat buyong ini tidak berbeda

dengan aturan hukum lainnya sebagaimana setiap aturan hukum dibuat disertai dengan sanksi bagi yang melanggar. Adanya sanksi yang diterapkan bagi pelaku perkawinan buyong ini bertujuan mencegah terjadinya tindakan yang dianggap bertentangan dengan adat, yaitu dalam adat perkawinan pada suku Melayu Jerieng.

Setiap warga yang terhindar dari pelanggaran terhadap hukum adat merupakan bentuk kepatuhan mereka kepada aturan adat. Bentuk ketaatan tersebut dapat terlihat dari tindakan-tindakan mereka, bahkan dalam bentuk yang terkecil. Sebagaimana observasi yang penulis lakukan di lapangan, bentuk ketaatan tersebut masih dapat dijumpai, misalnya adanya larangan *besiol* (bersiul) dan *kemeh berdiri* (kencing berdiri) di lingkungan umum. Pelakunya mendapat teguran tidak hanya dari para tokoh adat, bahkan warga yang melihat tindakan tersebut pun harus memberi nasehat.

B. Bentuk-Bentuk Sanksi Hukum Dalam Adat Buyong.

Setiap pelanggaran terhadap larangan adat akan dikenakan sanksi oleh para tokoh adat yang berwenang memberikan sanksi. R Soepomo mengatakan di antara sanksi yang dijatuhkan terhadap pelanggaran hukum adat adalah ganti kerugian immaterial seperti paksaan menikah, bayaran uang, selamatan, penutup malu, hukuman badan hingga hukuman mati, dan pengasingan.⁶ Sementara Bushar Muhammad mengatakan, "sanksi dapat juga berupa celaan, tidak diajak bicara, dan diusir dari lingkungan masyarakat

⁶ R. Soepomo, *op.cit*, h. 117

hukum adat."⁷ Begitu pula dalam adat Melayu Jerieng, tidak ada perbedaan, juga memiliki sanksi sebagaimana yang dirumuskan R Soepomo dan Bushar Muhammad di atas.

Dalam hukum adat Melayu Jerieng, kata Abdullah,⁸ sanksi yang harus dijalankan bagi pelanggar hukum adat bisa berupa selamatan, denda, penutup malu, pengasingan, hukuman badan, dan hukuman moral berupa tidak diikutsertakan dalam sosialisasi bermasyarakat.

Adapun sanksi hukum dalam adat buyong pada suku Melayu Jerieng dapat dilihat sebagaimana keterangan di bawah ini:

1. Buyong Nuron (buyong 6)

Buyong Nuron adalah seorang laki-laki mengawini sepupu dari pihak ibu dan terns ke bawah. Misalnya, fulan mengawini saudara sepupu perempuan dari pihak ibu, atau mengawini anak perempuan saudara sepupu dari pihak ibu, atau cucu perempuan saudara sepupu dari pihak ibu. Perkawinan ini disebut juga buyong 6 karena sanksi yang dikenakan kepada pelakunya dibebankan membayar denda sebanyak 6 hitungan.⁹

⁷ Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar*, (Jakarta: Karista, 2006), h. 20

⁸ Abdullah, (tokoh adat Melayu Jerieng), *Wawancara*, Ahad 11 April 2010

⁹ Sardi bin Buman, (Ketua Lembaga Adat Melayu Jerieng), *Wawancara*, Ahad 2 Mei 2010

Terdapat dua sanksi terhadap pelanggaran adat ini yaitu sanksi berupa denda dan hukuman badan. Dalam hal sanksi denda bagi warga yang telah melanggar aturan ini akan mendapat sanksi berupa membayar uang sebanyak 6 wang¹⁰, 6 cupak beras, 6 kati gula (1 kati = 6 ons).

Adapun hukuman badan yang harus dijalani paktel¹¹ adalah berupa digoresi daun telinga dengan menggunakan daun tebu hitam hingga mengeluarkan darah dan disirami dengan air panas. Hukuman badan ini dilaksanakan ketika upacara adat berlangsung.¹²

2. Buyong Nayek (buyong 24)

Buyong Nayek adalah seorang laki-laki mengawini sepupu bapak atau sepupu ibu terns ke atas. Misalnya, fulan mengawini seorang perempuan dimana perempuan tersebut adalah saudara sepupu bapak atau sepupu ibunya, atau fulan mengawini seorang perempuan dimana perempuan tersebut adalah ibu dari saudara sepupu bapak atau sepupu ibunya. Perkawinan ini dinamakan juga dengan buyong 24, sebab sanksi yang dikenakan kepada pelakunya dibebankan membanyar

¹⁰ ° Wang merupakan mats uang yang berlaku pada zaman dulu. Nilai Rp. 1 sama dengan 10 Wang, 1 wang sama dengan 10 sen, Rp. 2,5 sama dengan 1 ringgit

¹¹ Paktel adalah istilah atau nama panggilan untuk para terpidana pada pelaksanaan hukum adat Suku Jerieng. Para Paktel ini selama menjalani hukuman tidak diperkenankan menggunakan baju alias bertelanjang dada, kecuali Paktel yang berjenis kelamin perempuan

¹² Sardi al -Palangasi, *op.cit*, h. 43

denda sebanyak hitungan 24.¹³

Sanksi denda bagi pelaku buyong nayek atau buyong 24 dibebankan membayar denda serba 24 seperti, uang sebanyak 24 tali, beras sebanyak 24 gantang, tikar Kuang sebanyak 24 lembar, dan tali yang digunakan untuk ayunan yang terbuat dari kulit kayu sebanyak 24 gintal.¹⁴

Adapun hukuman badan bagi pelaku buyong nayek adalah digoresi kedua daun telinga dengan menggunakan daun lais dan daun tebu hitam hingga mengeluarkan darah. Kemudian para paktel diwajibkan menginjak-injak bara api dan disirami dengan air panas.¹⁵

c. Buyong Besak (buyong 26)

Buyong besak adalah seorang laki-laki mengawini anak sepupu laki-lakinya (memutuskan ahli waris). Misalnya, Amir dan Sainuddin adalah saudara sepupu, kemudian Amir mengawini anak perempuan Sainuddin. Bagi warga suku Melayu Jerieng yang melakukan buyong besak ini akan dikenakan sanksi hukuman badan dan sanksi denda. Perkawinan buyong besak disebut juga buyong 26, karena sanksi denda yang harus dibayar

¹³ Sardi bin Buman, (Ketua Lembaga Adat Melayu Jerieng), *Wawancara*, Ahad 2 Mei 2010

¹⁴ 1 tali sama dengan 25 sen, 1 gantang (gantang besak) sama dengan 1 kg, 1 cupak sama dengan 250 gram, 1 kati sama dengan 6 ons

¹⁵ Sardi al -Palangasi, */oc.cit*

oleh pelakunya sebanyak hitungan 26.¹⁶

Adapun hukuman badan yang dijatuhkan kepada paktel pelaku buyong ini adalah digoresi kedua daun telinga dengan menggunakan daun lais dan daun tebu hitam hingga mengeluarkan darah. Dalam hal sanksi denda, yang dikenakan bagi pelaku adalah pelaku buyong ini diwajibkan membayar denda serba 26 seperti, uang sebanyak 26 ringgit(1 ringgit = Rp 2,5), tikar yang terbuat dan Kuang sebanyak 26 lembar, sumpit sebanyak 26 buah, dan lanjong sebanyak 26 buah.¹⁷

d. Buyong Aram

Buyong aram adalah seorang laki-laki mengawini saudara bapak, saudara ibu hingga ke atas, saudara perempuan, anak saudara dan anak perempuan hingga ke bawah. Sanksi yang diberlakukan bagi pelakunya apabila hal ini terjadi maka satu-satunya hukuman adalah kedua paktel dibuang untuk selama-lamanya.¹⁸

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Hukum Dalam Adat Buyong Pada Suku Melayu Jerieng.

Islam sebagai agama rahmat telah mengatur hukum perkawinan dengan sebaik-baiknya. Aturan hukum tersebut berlaku sejak seorang laki-laki berkehendak melangsungkan perkawinan, pada tahapan ini dalam fiqh disebut

¹⁶ Sardi bin Buman, (Ketua Lembaga Adat Melayu Jerieng), *Wawancara*, Ahad 2 Mei 2010

¹⁷ Sardi al-Palangasi, *op.cit*, h. 44

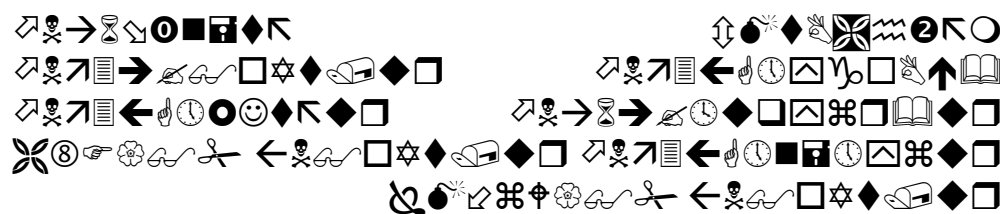
¹⁸ *Ibid*

khitbah atau peminangan.

Jika seorang laki-laki telah mantap memilih kebaikan pada calon pasangannya, rela dengan perempuan yang dipilihnya dengan sifat-sifatnya, dan ia mengetahui kebaikan-kebaikan perempuan tersebut, serta ia dapat menanggung beban tanggung jawab keluarga, maka dapatlah ia meminangnya. Dasar-dasar inilah sebagai pegangan bagi seorang laki-laki yang dapat dilanjutkan kepada ikatan perkawinan.

Namun demikian, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh seorang laki-laki yang hendak kawin. Menurut hukum Islam tidak semua perempuan dapat dikawini oleh laki-laki atau sebaliknya tidak semua laki-laki yang dapat mengawini seorang perempuan, yang disebut dengan larangan kawin. Larangan kawin berarti melarang seorang laki-laki mengawini perempuan-perempuan yang secara tegas diharamkan oleh syari'at Islam.

Dalam hubungan kekerabatan, hukum perkawinan Islam melarang mengawini perempuan-perempuan yang telah disebutkan berdasarkan ketentuan Al-Quran. Perempuan yang dilarang mengawininya tersebut adalah sebagaimana keterangan dalam surat An-Nisa ayat 23 berikut ini:



Artinya: "Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan. saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan.... "¹⁹

¹⁹ Departemen Agama, *loc.cit*

Ayat di atas menjelaskan bahwa perempuan yang haram dikawini karena hubungan nasab itu ada 7 golongan, yaitu ibu, anak, saudara, bibi dari bapak, bibi dari ibu, keponakan dari saudara laki-laki, keponakan dari saudara perempuan. Semuanya ini haram dikawini untuk selama-lamanya.

Termasuk golongan ibu, ialah nenek terus ke atas. Termasuk anak, ialah cucu sampai ke bawah. Termasuk saudara, ialah saudara baik secara kandung maupun saudara seapak atau saudara seibu saja. Termasuk bibi ialah, orang tua bibi, baik bibi dari pihak ayah atau bibi dari pihak ibu.²⁰

Adapun perkawinan kerabat pada suku Melayu Jerieng, tidak berbeda dengan hukum perkawinan Islam, dalam hukum perkawinan adat Melayu Jerieng juga terdapat larangan kawin. Hula= perkawinan adat Melayu Jerieng melarang setiap warga melakukan perkawinan sesama kerabat yang disebut dengan perkawinan buyong.

Larangan perkawinan buyong ditujukan kepada warga yang masih ada hubungan darah menurut silsilah kekeluargaan, yaitu antara seorang laki-laki dan perempuan yang masih tergolong kerabat maka berlaku larangan bagi keduanya apabila melakukan perkawinan.

Berdasarkan uraian sebelumnya, larangan mengawini kerabat dalam adat

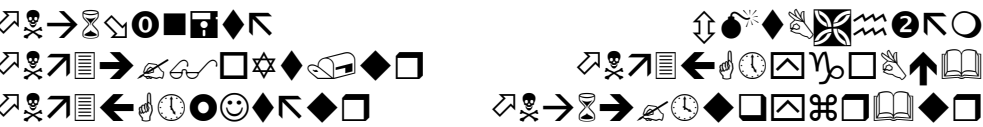
²⁰ 20 Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Terjemahan Tafsir Ayat Ahkam Ash-Shabuni*, penterjemah: Mu'ammam Hamidy dan Imron A. Marian, (Surabaya: PT. Bina Ilmu Offset, 2008), h. 331

buyong dengan larangan dalam perkawinan Islam ada persamaan dan ada pula perbedaannya. Perbandingan larangan tersebut dapat terlihat sebagaimana uraian berikut ini:

Golongan perempuan yang dilarang mengawininya dalam hukum Islam, secara urut menurut hubungan terdekat adalah ibu, nenek; baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu, anak, cucu; baik cucu dari anak laki-laki maupun dari anak perempuan, saudara; baik saudara kandung, seapak dan seibu saja, saudara ayah, saudara ibu, anak saudara, baik dari saudara laki-laki maupun saudara perempuan.

Golongan perempuan yang dilarang mengawininya dalam adat buyong menurut urutannya adalah ibu, nenek; baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu, anak, cucu; baik cucu dari anak laki-laki maupun dari anak perempuan, saudara; baik saudara kandung, seapak dan seibu saja, saudara ayah, saudara ayah, saudara ibu, saudara ayah, saudara ibu, saudara sepupu ayah dan saudara sepupu ibu, saudara sepupu; baik dari pihak ayah maupun pihak ibu, cucu dari saudara sepupu ayah dan cucu dari saudara sepupu ibu, anak perempuan sepupu laki-laki.

Dari penjelasan di atas, urutan perempuan-perempuan yang dilarang tersebut, antara hukum Islam dan adat buyong ada yang sejalan dan ada pula yang tidak. Pada urutan *ibu, nenek, anak, cucu, saudara, anak saudara, saudara bapak atau saudara ibu*, dalam adat buyong jelas tidak ada perbedaan sama sekali dengan larangan dalam hukum Islam. Urutan tersebut sejalan dengan dalil Al-Quran dalam surat An-Nisa ayat 23 di bawah ini:





Artinya: "Diharamkan alas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara hapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan..."²¹

Dari perbandingan di atas, menjelaskan bahwa larangan dalam adat buyong ada yang sejalan dengan dalil al-Qur'an atau tidak bertentangan dengan hukum Islam. Akan tetapi, bila melihat kepada urutan selanjutnya dalam adat buyong, maka akan terlihat perbedaannya dengan larangan dalam hukum Islam. Larangan dalam hukum Islam terbatas kepada perempuan-perempuan yang telah disebutkan oleh nash Al-qur'an atau yang dimasukkan ke dalam golongan tersebut. Ini berarti, selain perempuan-perempuan tersebut boleh dikawini.

Sedangkan dalam adat buyong, larangan tersebut tidak terbatas kepada perempuan yang dilarang berdasarkan nash solo, akan tetapi larangan tersebut lebih luas. Dalam adat buyong, setiap perempuan yang tergolong kerabat maka terlarang mengawininya. Termasuk yang digolongkan ke dalam kerabat yang terlarang mengawininya dalam adat buyong adalah saudara sepupu bapak atau ibu, saudara sepupu, dan yang lainnya, sebagaimana penjelasan sebelumnya siapa saja golongan yang termasuk ke dalam kerabat dekat,²² yang mana dalam hukum Islam boleh dikawini tetapi dalam adat buyong dilarang.

Pada kasus yang penulis teliti, dari kedua pasangan yang melakukan

²¹ Departemen Agama, *loc.cit*

²² Lihat kembali penjelasan golongan yang termasuk ke dalam kerabat dekat pada bab 3, halaman 28

perkawinan buyong, kasus pertama yaitu pasangan Firdaus (36 tahun) dan Lisnawati (27 tahun), perkawinannya disebut buyong nuron karena pihak laki-laki yaitu Firdaus mengawini Lisnawati anak perempuan saudara sepupunya. sementara pada kasus yang kedua Sumi'an (32 tahun) mengawini Jumiyah (28 tahun) yaitu saudara sepupu ibu Sumi'an yang dikenal dengan istilah buyong nayek. Dari kasus di atas, apabila ditinjau menurut hukum Islam jelas perkawinan tersebut tidak dilarang. Akan tetapi menurut adat perkawinan tersebut adalah perkawinan terlarang. Dalam hukum Islam, perempuan yang dilarang mengawininya adalah golongan yang secara jelas ditetapkan berdasarkan nash al-qur'an.

Pada kasus di atas, perempuan yang dikawini oleh Firdaus maupun Sumi'an, jelas bukan termasuk perempuan yang dilarang menikahinya menurut hukum Islam. Jadi dengan demikian kedua kasus perkawinan di atas tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Pada dasarnya larangan di dalam Islam mempunyai tujuan yang baik. Suatu larangan tidak ditetapkan melainkan demi kemashlahatan manusia itu sendiri. Banyak hikmah dibalik larangan mengawini perempuan karena hubungan nasab.

Hikmah diharamkannya mengawini perempuan-perempuan tersebut sudah cukup jelas. Yusuf Al-Qaradhawi, menyebutkan hikmah-hikmah tersebut, antara lain:

- 1) Bahwa setiap manusia yang maju, fitrahnya (jiwa murninya) pasti tidak akan suka melepaskan nafsu seksualnya kepada ibu, saudara ataupun anak. Sedangkan perasaannya kepada bibi sama dengan perasaannya terhadap ibu.
- 2) Antara seorang laki-laki dengan keluarga dekatnya (qarib) mempunyai perasaan yang mencerminkan suatu penghormatan. Maka akan lebih utama kalau mencurahkan perasaan cintanya itu kepada perempuan lain melalui perkawinan, sehingga terjadi suatu perhubungan yang

barn dan rasa cinta kasih-sayang antara manusia itu menjadi sangat luas.

- 3) Perasaan yang bersifat azali antara seseorang dengan keluarganya ini, harus dikukuhkan supaya terus bergelora agar perhubungan di antara sesama mereka dapat berlangsung terus. Mempertemukan perasaan ini suatu pertengkaran, kadang-kadang dapat menimbulkan suatu perpisahan yang dapat menghilangkan keabadian dan kekalan perasaan cinta tersebut.
- 4) Keturunan yang diperoleh dari keluarga dekat, kadang-kadang tidak sempurna dan lemah. Kalau pada benih seseorang itu ada kelemahan jasmani atau akal, maka hal ini akan menular kepada keturunannya.²³

As-Sakaki, sebagaimana dikutip oleh Ali Yusuf As-Subki, mengatakan bahwa, "sesungguhnya menikahi mereka mengakibatkan pemutusan kerabat, karena pernikahan itu tidak terlepas dan kelapangan yang tejalin antara suami istri secara tradisi dan karena sebab-sebab ini menjadikan kekerasan hati diantara mereka. Suatu ketika hal tersebut membawa terputusnya hubungan kerabat, sehingga menikah dengan mereka menjadi penyebab untuk memutus kerabat."²⁴

Alasan haramnya menikahi ibu tidak diragukan lagi bahwa ibu mempunyai rasa kelembutan hati yang besar terhadap anak-anaknya. Kasih sayangnya sangat kuat dan perasaannya lebih dalam. Selain itu, janin terbentuk dari darah dagingnya yang menjadi penopang kehidupannya. Setelah itu, janin itu lahir kemudian ia makan dari air susu ibunya, sehingga pada saat ia menghisap air susu sang ibu, dia merasakan dekapan kasih sayang yang

²³ Yusuf Al-Qaradhawi, *Halal dan Haram*, penerjemah: Tim Kuadran, (Bandung: Jabal, 2007), Cet. Ke-1, h. 186-187

²⁴ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, Penerjemah: Nur Khozin, (Jakarta: Amzah, 2010), Cet. Ke-1, h. 12

tumbuh dari dalam lubuk hatinya.

Tidakkah suatu hal yang amat keji secara fitrah manakala kecintaan yang amat besar di antara anak dan orang tuanya mengarah pada hal-hal yang berkenaan dengan pelampiasan nafsu syahwat, yang pada akhirnya akan merusak dan menghancurkan jalinan kasih sayang di antara mereka. Karena itu, haramnya menikahi ibu lebih ditekankan dan diletakkan pada posisi yang paling depan dalam ayat Al-Quran, lantas disusul dengan haramnya menikahi anak-anak perempuan.²⁵

Adapun hubungan di antara saudara laki-laki dan saudara perempuan, sesungguhnya hubungan di antara mereka tak ubahnya hubungan anak dan orang tuanya, di mana di antara mereka lalcsana satu tubuh. Sebab, baikJsaudara laki-laki ataupun saudara perempuan, sama-sama berasal dari satu sumber dan satu nasab dengan tanpa ada perbedaan di antara keduanya.²⁶

Mengenai bibi, baik dan pihak ayah maupun pihak ibu, mereka diharamkan dinikahi karena mereka berasal dan silsilah keturunan yang sama. Ini berarti bahwa hubungan seseorang dengan bibinya berawal dan hubungan kekerabatan (saudara kandung) yang terjalin antar mereka dengan ayah dan ibu. Dengan demikian, Islam tidak memberi ruang bagi seorang laki-laki menikahi bibinya.

Karena itu, ajaran Islam menjunjung tinggi fitrah manusia agar selalu menjaga dan memperhatikan hubungan kasih sayang seseorang dengan bibinya, tolong menolong di antara mereka, serta hubungan yang tidak diiringi

²⁵ Sayyid Sabiq, *op.cit*, h 309

²⁶ *Ibid*

oleh nafsu syahwat. Berdasarkan semua hal ini, agama melarang laki-laki menikahi bibinya.²⁷

Begitu pula dengan kemenakan perempuan (baik anak dan saudar laki-laki maupun perempuan), talc ubahnya seperti anak-anak perempuannya karena hubungan saudara kandung, baik laki-laki maupun perempuan ibarat dirinya sendiri. Bagi seseorang yang berakal sehat, akan tumbuh dalam hatinya perasaan seperti ini.²⁸

Itulah beberapa bentuk hubungan kekeluargaan yang dengannya manusia dapat saling mengasihi, mencintai, menyayangi, dan saling tolong menolong.

Berdasarkan hal itu, Allah SWT menumbuhkan dalam hati mereka perasaan cinta, kelembutan, kasih sayang, serta perasaan untuk saling menghormati. Karena itu, Allah SWT mengharamkan pernikahan di antara mereka dengan tujuan agar kasih sayang dan rasa cinta yang terjalin di antara suami dan istri dapat menambah jalinan kekerabatan antar manusia. Begitu juga dengan kerabat seperti sepupu, baik dari pihak paman maupun pihak bibi.²⁹

Hikmah lainnya, menurut pendapat Syeikh Muhammad Abduh tentang hikmah di balik larangan menikahi muhrim dan kerabat. Sebagaimana dikutip Sayyid Sabiq, Abduh mengatakan, "larangan menikahi kerabat dekat memiliki hikmah yang berkaitan erat dengan fisik manusia yaitu bahwa pernikahan dengan kerabat dekat dapat mengakibatkan lemahnya keturunan."³⁰

²⁷ *Ibid*

²⁸ *Ibid*

²⁹ *Ibid*, h. 312

³⁰ *Ibid*

Apabila pernikahan antar kerabat dilaksanakan secara berkelanjutan, tentunya akan tumbuh generasi baru yang lemah hingga sampai pada tataran kepunahan atau terputusnya nasab atau garis keturunan. Keadaan seperti ini tidak terlepas dari dua hal, yaitu:

Pertama: sebagaimana yang disyaratkan oleh para Ulama fiqh bahwasanya kuatnya keturunan bergantung pada kuatnya dorongan motivasi untuk mendapatkan keturunan, yaitu kuatnya syahwat. Mereka juga mengatakan bahwa syahwat pada pasangan suami-istri akan semakin melemah yang memiliki hubungan kekerabatan dekat.

Para ulama menjadikan sebab ini *sebagai* alasan tidak dianjurkannya seseorang menikahi sepupunya, baik anak dari pihak paman maupun bibi. Hal itu karena yang menjadi alasan mendasar dalam hal ini adalah bahwa syahwat merupakan perasaan yang tumbuh dari dalam hati seseorang, yang sifatnya bertolak belakang dengan perasaan kasih sayang yang tercipta antar kerabat sehingga perasaan itu dapat menghilangkan unsur birahi seseorang atau melemahkannya.³¹

Kedua: sebagaimana penelitian para ahli tanaman menyebutkan bahwa apabila biji suatu tanaman, misalnya biji gandum ditanam di atas lahan untuk kemudian salah satu biji yang dihasilkannya itu ditanam kembali di atas lahan yang sama, maka tanaman itu akan mengalami pertumbuhan yang lambat dan hasil yang didapatkan pun akan berkurang. Lain halnya jika biji tersebut diambil dari jenis atau basil yang lain dan ditanam di atas lahan itu, maka

³¹ *Ibid*

tanaman akan tumbuh dengan baik dan kualitasnya juga baik.³²

Begitu juga perempuan. Dia diibaratkan lahan yang ditanami atau disemai hingga melahirkan anak. Karena itu, seorang laki-laki dianjurkan agar menikahi perempuan dari keluarga yang bukan kerabatnya agar dia dapat melahirkan keturunan yang baik dan berkualitas.

Apa yang telah diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa pemikahan antar kerabat berdampak negatif baik secara fisik maupun psikis, berlawanan dengan fitrah manusia, bertentangan dengan aturan hubungan antar manusia, serta menjadi penghalang bagi kemajuan dan kemuliaan manusia.³³

Berdasarkan uraian di atas, maka larangan menikahi kerabat selain yang disebutkan al-Qur'an dalam adat buyong juga memiliki nilai kemashlahatan, yakni mengantisipasi dampak negatif yang terjadi karena perkawinan kerabat agar memiliki keturunan yang berkualitas baik dari segi fisik maupun mental, sehingga berpengaruh kepada keharmonisan dan kelanggengan dalam sebuah rumah tangga.

Adapun sanksi dalam adat buyong, sanksi tersebut adalah suatu ketetapan yang berlandaskan kepada hukum adat yang sudah menjadi tradisi secara turun-temurun. Mengenai tradisi atau adat dalam pandangan hukum Islam, pada dasarnya hukum Islam juga mengakui keabsahan suatu adat.. Sebagaimana penjelasan sebuah kaidah fiqh yang berbunyi: "*Adat dapat dijadikan (pertimbangan) hukum.*"³⁴

³² *Ibid*,

³³ *Ibid*,

³⁴ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2006), Cet. Ke-1, h. 78

Kaidah di atas memberi pemahaman bahwa hukum Islam menerima adat sebagai suatu hukum yang diakui secara sah dapat mengatur kehidupan sosial dalam suatu masyarakat, baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan. Sebagaimana definisi adat dalam pandangan pakar hukum Islam dalam kutipan Samir Aliyah, para pakar hukum Islam mendefinisikan adat dengan: "Apa yang biasa dilakukan mayoritas manusia, baik dalam bentuk ucapan maupun perbuatan, hingga meresap ke dalam jiwa mereka dan diterima dalam pemikiran mereka,"³⁵ atau "kebiasaan mayoritas kaum dalam ucapan atau perbuatan."³⁶

Abdul Wahhab khallaf mengatakan bahwa adat juga dikenal dalam pembentukan hukum Islam, yaitu disebut dengan "*urf*", yakni segala sesuatu yang saling dikenal di antara manusia yang sudah menjadi kebiasaan baik berupa perkataan, perbuatan atau dalam kaitannya dengan meninggalkan perbuatan tertentu.³⁷

Urf ini terbagi kepada dua macam:

1. '*Urf shoheh*', yaitu segala sesuatu yang sudah dikenal umat manusia yang tidak bertentangan dengan dalil syara' di samping tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib.

2. '*Urf fasid*', yaitu segala sesuatu yang sudah dikenal oleh umat manusia,

³⁵ Lihat Samir Aliyah, *Buku Sistem Pemerintahan, Peradilan dan Adat Dalam Islam*,

Pent: Asmuni Solihan Zamakhsyari, (Jakarta: Khalifa, 2004), Cet. Ke-1, h. 495

³⁶ *Ibid*

³⁷ A. Wahhab Khallaf, *Ilmu Usul Fiqh*, (Jakarta: Dewan Dakwah Islam, 1990), h. 89

tetapi berlawanan dengan syara' atau menghalalkan dan membatalkan yang wajib.³⁸

Dan pembagian `urf di atas, para ulama telah sepakat bahwa 'lid yang dapat diakui sebagai suatu hukum adalah *`urf shoheh* bukan *`urf fasid*. `Urf atau adat shoheh adalah apabila memenuhi unsur-unsur berikut ini:

1. Adat yang tidak bertentangan dengan nash baik Al-Qur'an maupun Al-Hadits.
2. Adat tersebut tidak menyebabkan kemafsadatan atau menghilangkan kemashlahatan termasuk di dalamnya tidak mengakibatkan kesulitan dan kesukaran.
3. Hants adat yang dilakukan secara terus menerus dan berlaku umum di kalangan kaum muslimin, dalam arti bukan hanya yang biasa dilakukan oleh beberapa orang saja, berdasarkan kaidah cabang dari kaidah *al-`adatu muhakkamah*. Kaidah tersebut berbunyi:

Artinya: "*Adat yang dianggap (sebagai pertimbangan hukum) itu hanyalah adat yang terus-menerus berlaku atau berlaku*"³⁹.

Bila adat tersebut dilakukan oleh beberapa orang saja dan tidak secara terus-menerus, maka tidak dianggap adat shoheh.⁴⁰

Selanjutnya adat tersebut juga harus memenuhi syarat. Syarat suatu adat yang dapat diakui oleh hukum Islam ialah adat tersebut tidak menafikan nash syar'i atau kontradiksi dengan salah satu dasar syari'ah yang qoth'i. Adat

³⁸ Mukhtar Yahya, Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1986), h. 109

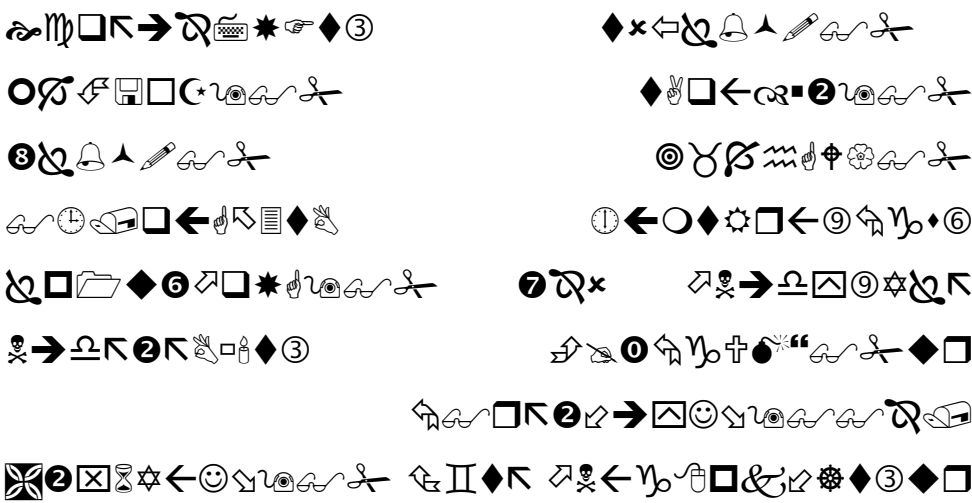
³⁹ A. Djazuh, *op.cit*, h. 83

⁴⁰ *Ibid*

baru dapat dijadikan *sumber* hukum dalam pembentukan hukum Islam, apabila adat tersebut termasuk ke dalam kategori "urf shoheh" yang tidak bertentangan dengan dalil yang qoth'i.

Apabila 'urf tersebut termasuk yang fasid, maka dia dinilai sebagai tradisi yang batil yang tidak sah pengamalannya, karena nash syari'ah didahulukan atas tradisi. Sebab syari'ah datang agar setiap individu tunduk kepada hukumnya, dan bukan syari'ah yang tunduk kepada tradisi mereka.⁴¹ Dengan demikian, hukum adat apabila tidak terdapat nash yang membolehkan menjadi suatu ketetapan hukum, berarti hukum Islam menolaknya.

Islam melarang umatnya mengikuti tradisi yang tidak baik yang apabila mereka lakukan akan memberatkan Hukum Islam mempunyai tujuan untuk memperbaiki keadaan manusia, menyuruh mengikuti segala perbuatan dan segala macam aturan yang baik dalam setiap segi kehidupan. Hukum Islam telah menetapkan segala yang dianggap baik dan segala yang dianggap buruk. Sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Quran surat al-A'raaf ayat 157, yang berbunyi:



⁴¹ Samir Aliyah, *loc.cit*

Artinya: "yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk."⁴²

berbunyi:

→ ☀️ ◻️ 📺 😊 📁 📖

📺 ☠️ 📺 ◻️ ☆ ③ 🚫 ⑩

📺 ☠️ 📺 📺 📺 ◻️ 📺 📖

→ ☀️ 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺

⁴² Departemen Agama, *op.cit.*, h. 135



Artinya: "Pada hari ini telah Kusempumakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."⁴³

Setelah penulis memperhatikan kedudukan adat dalam hukum Islam di atas, menurut penulis sanksi hukum yang berlaku dalam adat buyong tidak boleh dilaksanakan. Hal ini disebabkan karena sanksi tersebut tidak memenuhi unsur-unsur dan persyaratan adat yang dapat menjadi sumber hukum.

Atas dasar inilah penulis mengatakan bahwa sanksi hukum dalam adat buyong pada suku Melayu Jerieng bertentangan dengan hukum Islam. Olehkarena itu, sanksi hukum dalam adat buyong bukan termasuk aturan yang sah karena tidak dapat menjadi hukum yang diakui oleh hukum Islam.

⁴³ Departemen Agama, *ibid.*, h. 85

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan bab-bab terdahulu maka penulis dapat memaparkan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Agama Islam melarang melakukan perkawinan hubungan kerabat. Kerabat yang dimaksud yaitu ibu, nenek; bark dari pihak ayah maupun dari pihak ibu, anak, cucu; baik cucu dari anak laki-laki maupun dari anak perempuan, saudara; bark saudara kandung, seapak dan seibu saja, saudara ayah, saudara ibu, anak saudara, bark dari saudara laki-laki maupun saudara perempuan.

Sedangkan yang tidak termasuk golongan tersebut, maka tidak ada larangan dalam hukum Islam. Golongan tersebut adalah saudara sepupu ayah dan saudara sepupu ibu, saudara sepupu; baik dari pihak ayah maupun pihak ibu, cucu dari saudara sepupu ayah dan cucu dari saudara sepupu ibu, anak perempuan sepupu laki-laki.

2. Perkawinan hubungan kerabat dalam adat buyong ada bagian larangan yang sejalan dengan hukum Islam dan ada pula yang tidak. Adapun larangan yang sejalan dengan hukum Islam, maka ia termasuk hukum yang tidak bertentangan dengan nash dan wajib ditaati. Sedangkan larangan yang tidak sejalan dengan hukum Islam, ia tidak termasuk hukum yang disyariatkan, dan syariat tidak melarang melakukannya.

Bentuk perkawinan yang bertentangan dengan hukum Islam adalah larangan bagi seorang laki-laki mengawini perempuan-perempuan yang tidak termasuk golongan yang dilarang berdasarkan nash, yaitu perempuan-perempuan pada golongan kedua sebagaimana pada kesimpulan poin pertama.

3. Sanksi hukum berupa denda dan hukuman badan terhadap yang melanggar adat buyong bukan termasuk hukum yang dapat dijadikan pertimbangan hukum, karena bukan adat yang shahih. Oleh karena itu, hukum Islam tidak mengakui sanksi hukum dalam adat buyong karena termasuk adat yang fasid. Adapun sebagai dasar bahwa sanksi hukun adat buyong ini termasuk adat yang fasid karena kriteria unsur dan persyaratan yang dapat dijadikan pertimbangan menurut hukum Islam tidak terpenuhi. Oleh karena itu, sanksi hukumnya tidak sah bertentangan dengan hukum Islam.

B. Saran

Isi ini mungkin jauh dan kesempumaan. Walaupun demikian, penulis merasa perlu memberikan saran-saran yang perlu diperhatikan, antara lain:

1. Kepada seluruh masyarakat dapat mematuhi larangan perkawinan dalam adat buyong ini sebatas larangan yang sejalan dengan hukum Islam.
2. Kepada seluruh tokoh adat suku Melayu Jerieng agar dapat memberi pertimbangan yang matang mengenai sanksi bagi yang melanggar adat buyong yang tidak bertentangan dengan syari 'at, atau sanksi hukum yang berlaku dalam adat ini dapat dihapuskan.
3. Sebaiknya seluruh masyarakat menjalankan hukum yang berdasarkan hukum Islam dan menolak melaksanakan suatu hukum adan aturan yang bertentangan dengan hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bukhori, Abu Abdillah Muhammad bin Isma'il, *Shohihul Bukhori*, Semarang: Toha Putra, th, Juz. 6
- Ali, Muhammad Daud, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Al-Kahalaniy, Muhammad bin Ismail, *Subulus Salam*, Bandung: dahian, th., jillid 3.
- Al-Palangasi, Sardi, *Khazanah Bangka Barat Istiadat, hukum Adat, dan gelar sapaan Adat Suku Jerieng*, Bangka: Lembaga Adat Melayu Jereng, 2007.
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali, *Terjemahan Tafsit Ayat Ahkam Ash-Shabuni*, penterjemah: Mu'ammam Hamidy dan Imron A. Manan, Surabaya: PT. Bina Ilmu Offset, 2008
- As-Subki, Ali Yusuf, *Fiqh Keluarga*, Penerjemah: Nur Khozin, Jakarta: Amzah, 2010, Cet. 1
- Departemen Agama, *Al Quran Terjemahan dan Penjelasan Ayat Hukum*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2002.
- Djazuli, Ahmad, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Kencana, 2006, Cet. 1
- Ghazaly, Abd. Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2006, Cet. 2.
- Hadikusuma, Hilman, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandar Lampung: Mandar Maju, 2003, cet II.
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jakarta: PT. Pustaka Panjimas, 1983, Juz 4, Cet.II
- I Doi, A. Rahman, *Penjelasan Lengkap Huk`um-Hukum Allah (Syari'ah)*, terj, Jakarta: PT. RaraGrafindo Persada, 2002, Cet. 1
- Khallaf , A. Wahhab, *Ilmu Usul Fiqh*, Jakarta: Dewan Dakwah Islam, 1990
- Muhammad, Bushar, *Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar*, Jakarta:Karista, 2006.

- Mukhtar Yahya, Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam!*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1986
- Muljana, Slamet, *Sriwijaya*, Yogyakarta:PT LKis Pelangi Aksara, 2008, Cet
- III. Muslim, *Shahih Muslim*, Bandung: Dahlan, th,
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, penerjemah: Khairul Amru Harahap, dkk, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008, Cet. 1, jilid 3
- Sardi, "Sejarah dan Islamisasi Desa Pelangas Kec. Simpangteritip", *Skripsi*. Dakwah PTDI, Tangerang, 1999
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2007, Cet.2.
- Twaidah , Kamil Muhammad, *figih Wanita*, penerjemah: M. Abdul goffar E.M, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998, Cet. 1.
- Zulkarnain Karim, dkk, *Kapita Selekta Budaya Bangka*, Sungailiat:Depdikbud Kab. Bangka, 1995, buku I
- Ichsan mokoginta dan Ryan paling, "Masyarakat Hukum Adat Semakin Terdesak" (online) :<http://www.posbelitung.com>
- Bagian Pemerintahan, *Laporan Kependudukan Kecamatan bulan April 2010*, Pelangas: Pemerintahan Kecamatan Simpang teritip, 2010.

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana sejarah dan asal-usul kesukuan Melayu Jerieng?
2. Apa tujuan hukum adat Melayu Jerieng?
3. Bagaimana sejarah perkawinan adat pada suku Melayu Jerieng?
4. Bagaimana bentuk perkawinan adat suku Melayu Jerieng?
5. Bagaimana sejarah berlakunya hukum adat buyong?
6. Apa alasan berlakunya sanksi dalam adat buyong?
7. Bagaimana bentuk-bentuk sanksi hukum dalam adat buyong?

PEDOMAN OBSERVASI

1. Mengamati aktifitas sehari-hari masyarakat Melayu Jerieng yang bersifat tindakan atau perbuatan.
2. Mengamati kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang termasuk norma adat setempat.
3. Mengamati bentuk kepatuhan masyarakat Melayu Jerieng terhadap norma adat.

DAFTAR TABEL

TABEL I	: Daftar Nama Desa Kecamatan Simpang Teritip dan Jumlah Penduduk di Tiap Desa	14
TABEL II	: Klasifikasi Jumlah Penduduk Kecamatan Simpang Teritip Menurut Jenis Kelamin	15
TABEL III	: Klasifikasi Penduduk Menurut Usia	16
TABEL IV	: Klasifikasi Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan	17
TABEL V	: Klasifikasi Penduduk Berdasarkan Agama atau Kepercayaan	18
TABEL VI	: Klasifikasi Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan	19

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana sejarah dan asal-usul kesukuan Melayu Jerieng?
2. Apa tujuan hukum adat Melayu Jerieng?
3. Bagaimana sejarah perkawinan adat pada suku Melayu Jerieng?
4. Bagaimana bentuk perkawinan adat suku Melayu Jerieng?
5. Bagaimana sejarah berlakunya hukum adat buyong?
6. Apa alasan berlakunya sanksi dalam adat buyong?
7. Bagaimana bentuk-bentuk sanksi hukum dalam adat buyong?

PEDOMAN OBSERVASI

1. Mengamati aktifitas sehari-hari masyarakat Melayu Jerieng yang bersifat tindakan atau perbuatan.
2. Mengamati kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang termasuk norma adat setempat.
3. Mengamati bentuk kepatuhan masyarakat Melayu Jerieng terhadap norma adat.